



PROFIL GENDER DAN ANAK

2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PADANG



ANGGOTA TIM PENYUSUN

Pengarah :
Eri Sendjaya, S.Sos., M.Si

Penanggung Jawab Teknis :
Imelda Novalin, S.E., M.Si

Penulis :
Admi Salma, S.Pd., M.Si

Pengolah Data :
Admi Salma, S.Pd., M.Si



KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 mengatur tentang satu data gender dan anak. Berdasarkan amanat tersebut, maka ketersediaan data terpilah di Kota Padang menjadi penting untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi nasional yang sistematis, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Penulisan buku Profil Gender dan Anak Kota Padang 2025 ini dilakukan dalam rangka menyediakan data dan informasi gender dan anak di Kota Padang Tahun 2025. Dalam buku ini disajikan profil perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan. Analisis gender diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kota Padang.

Buku ini dapat disusun berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan beberapa pihak terkait. Semoga koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak yang telah dilaksanakan selama ini di Kota Padang dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan data yang telah diolah dapat kita manfaatkan bersama dan seluas-luasnya

Padang, September 2025
Kepala DP3AP2KB Kota Padang

Eri Sendjaya, S. Sos., M. Si
NIP. 19700829 199003 1 0

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	01
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	09
BAB III STRUKTUR KEPENDUDUKAN	12
BAB IV KONSTRUKSI GENDER	26
BAB V GENDER DAN ANAK BIDANG PENDIDIKAN	29
BAB VI BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	42
BAB VII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	70
BAB VIII BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA	83
BAB IX BENCANA ALAM	110
BAB X PENUTUP	112



Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Padang Tahun 2024	13
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang 2024	14
Tabel 3. Rekapitulasi Data Kepemilikan KTP-el Kota Padang Per Kecamatan Tahun 2024	19
Tabel 4. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2024	21
Tabel 5. Persentase Kepala Keluarga berdasarkan kelompok Umur di Kota Padang 2024	24
Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2024	32
Tabel 7. Sebaran Guru Honorer Kota Padang tahun 2024	38
Tabel 8. Daftar Anak yang Datang Memanfaatkan Pustaka Kota Padang Tahun 2024	39
Tabel 9. Daftar Taman / Ruang Bermain Anak Kota Padang Tahun 2024	40
Tabel 10. Angka Kematian Ibu berdasarkan Umur di Kota Padang Tahun 2024	45
Tabel 11. Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas Tahun 2024	47
Tabel 12. Cakupan Pelayanan Antenatal Care per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024	49
Tabel 13. Cakupan Tablet Fe pada Bumil Kota Padang Tahun 2024	50
Tabel 14. Cakupan Imunisasi Td 2+ berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024	52



Daftar Tabel

Tabel 15. Jumlah Kematian Bayi dan Balita Kota Padang tahun 2024	54
Tabel 16. Cakupan Bayi BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Kota Padang Tahun 2024	56
Tabel 17. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kota Padang Tahun 2024	57
Tabel 18. Status Gizi Balita Berdasarkan Kecamatan Kota Padang tahun 2024	60
Tabel 19. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kota Padang Tahun 2024	62
Tabel 20. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Kota Padang Tahun 2024	64
Tabel 21. Jumlah Peserta KB Baru (PB) Perkecamatan Kota Padang Tahun 2024	66
Tabel 22. Jumlah BKB dan BKR di Kota Padang Tahun 2024	68
Tabel 23. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif di Kota Padang Tahun 2024	69
Tabel 24. Koperasi di Kota Padang tahun 2024	72
Tabel 25. Jenis Usaha Mikro dan Data Jumlah Tenaga Kerja pada UMK Kota Padang tahun 2024	73
Tabel 26. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMK Per Kecamatan di Kota Padang tahun 2024	78



Daftar Tabel

Tabel 27. Pelatihan Produktivitas Pelaku UMKM Kota Padang 2024	79
Tabel 28. Jumlah Kelompok Nelayan Menurut Kecamatan Kota Padang Tahun 2024	80
Tabel 29. Jumlah Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Kota Padang 2024	82
Tabel 30. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	86
Tabel 31. Data Klien yang Telah Selesai Menjalani Pidana di Bapas Kota Padang Berdasarkan Kasus dan Jenis Kelamin Tahun 2024	87
Tabel 32. Data korban Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Padang	88
Tabel 33. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Mendukung Puspaga Basamo tahun 2024	90
Tabel 34. Jenis dan Capaian layanan PUSPAGA BASAMO Kota Padang Tahun 2024	91
Tabel 35. Jumlah Pilar Sosial di Kota Padang Tahun 2024	93
Tabel 36. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur di Kota Padang Tahun 2024	94
Tabel 37. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Tahun 2024	95
Tabel 38. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pekerjaan di Kota Padang Tahun 2024	96



Daftar Tabel

Tabel 39. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kota Padang Tahun 2024	97
Tabel 40. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kota Padang Tahun 2024	99
Tabel 41. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat terjadi di Kota Padang Tahun 2024	100
Tabel 42. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis pelayanan yang diterima dari P2TP2A di Kota Padang Tahun 2024	101
Tabel 43. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut frekuensi kekerasan di Kota Padang Tahun 2024	102
Tabel 44. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Padang 2024	103
Tabel 45. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis layanan di P2TP2A Kota Padang 2024	105
Tabel 46. Jumlah Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur di Kota Padang 2024	106
Tabel 47. Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Hubungan dengan korban Anak di Kota Padang Tahun 2024	107
Tabel 48. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Padang Tahun 2024	110



Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kota Padang	9
Gambar 2. Penduduk Yang Memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIK) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2024	15
Gambar 3. Jumlah kepemilikan akta kelahiran Kota Padang 2024	17
Gambar 4. Jumlah kepemilikan KIA Kota Padang 2024	18
Gambar 5. Persentase kepala keluarga perempuan di Kota Padang tahun 2023 dan 2024	22
Gambar 6. Persentase kepala keluarga berdasarkan kelompok Umur di Kota Padang	25
Gambar 7. Indeks Pembangunan Gender Kota Padang 2024	27
Gambar 8. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Padang 2024	28
Gambar 9. Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang	31
Gambar 10. Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kota Padang dan Provinsi 2024	33
Gambar 11. Persentase Angka Melek Huruf Kota Padang 2024	35
Gambar 12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang Tahun 2024	36
Gambar 13. Umur Harapan Hidup di Kota Padang	43
Gambar 14. Angka Kematian Ibu di Kota Padang	46
Gambar 15. Cakupan Imunisasi Td di Kota Padang tahun 2024	53
Gambar 16. Persentase bayi imunisasi lengkap Kota Padang 2023 dan 2024	58



Daftar Gambar

Gambar 17. Status Gizi Balita Kota Padang Tahun 2023 dan 2024	61
Gambar 18. Sebaran kasus HIV menurut Kelompok Usia di Kota Padang Tahun 2023 dan 2024	63
Gambar 19. Jumlah Posyandu Kota Padang dari Tahun 2023 ke 2024	65
Gambar 20. Sebaran Program KB berdasarkan gender di Kota Padang	67
Gambar 21. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	71
Gambar 22. Persentase Penduduk berusia 10 tahun menurut Status Perkawinan Di Kota padang tahun 2024	83
Gambar 23. Sebaran jumlah ABH berdasarkan kasus yang ditangani BAPAS I Kota padang 2024	85
Gambar 24. Jumlah kekerasan pada perempuan berdasarkan frekuensinya pada tahun 2023 dan 2024 di Kota Padang	103
Gambar 25. Sebaran Jumlah Pengguna NAPZA tahun 2023 dan 2024 Kota Padang	108





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

Gender

Merupakan konsep sosial dan budaya yang menggambarkan perbedaan peran, tanggung jawab, kedudukan, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis, gender terbentuk melalui proses sosial dan kultural yang berkembang dalam masyarakat.

Penduduk menurut Jenis Kelamin

Orang yang tinggal di wilayah Kota Padang baik yang secara hukum berhak tinggal di Padang tetapi memilih tinggal di daerah lain, dengan kata lain meiliki surat resmi (KK Kota Padang) maupun yang belum memiliki KK Kota Padang tapi menetap di wilayah Kota Padang dan dibedakan menurut jenis kelamin Laki-laki dan Perempuan.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu per satuan luas wilayah tersebut, biasanya dinyatakan dalam jumlah orang per kilometer persegi (jiwa/km²). Indikator ini digunakan untuk menganalisis distribusi populasi dan beban wilayah.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase kenaikan jumlah penduduk dari penduduk dasar.

Akta Kelahiran

Adalah Surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil tiap daerah atau kantor yang menyediakan layanan kependudukan yang terafiliasi dengan Dinas Kependudukan dan kantor catatan sipil Kementrian Dalam Negeri.





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

Kartu Identitas Anak (KIA)

Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang.

Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Keluarga

Individu yang dianggap atau diakui sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kepala keluarga biasanya bertanggung jawab atas pengambilan keputusan utama, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga. Status ini dapat ditentukan berdasarkan hubungan keluarga.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks komposit yang mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi aktif dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan, dibandingkan dengan laki-laki.

Dimensi dan Indikator Pembentuk IDG:

- a. Keterwakilan perempuan di parlemen (DPR/DPRD)
- b. Perempuan sebagai tenaga profesional/teknis
- c. Pendapatan perempuan relatif terhadap laki-laki





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

IDG dihitung menggunakan rasio capaian perempuan terhadap laki-laki untuk setiap indikator, lalu dinormalisasi (0–100), dan digabungkan menjadi rata-rata tertimbang untuk memperoleh nilai indeks.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perbandingan Antara Jumlah Penduduk Yang Masih Bersekolah Di Jenjang Pendidikan Tertentu (Tanpa Memandang Usia Penduduk Tersebut) Dengan Jumlah Penduduk Yang Memenuhi Syarat Resmi Penduduk Usia Sekolah Di Jenjang Pendidikan Yang Sama. Angka Partisipasi Kasar disajikan dalam bentuk persentase.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Proporsi anak sekolah pada kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Tingkat Melek Huruf

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Termasuk dapat membaca dan menulis: 1. Penyandang disabilitas penglihatan yang dapat membaca dan menulis huruf braille. 2. Dapat membaca dan menulis huruf braille Arab/Hijaiyah. 3. Orang difabel/cacat yang





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena disabilitasnya/kecacatannya tidak dapat membaca dan menulis. 4. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis karena katarak, lumpuh atau struk, padahal sebelumnya dapat membaca dan menulis.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.

Umur Harapan Hidup (UHH)

Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Kematian Ibu (AKI)

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 10.000 kelahiran hidup.

Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-5 tahun dari setiap kelahiran 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun.

Postandu

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) adalah sebuah layanan kesehatan yang berbasis masyarakat di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita. Posyandu biasanya dikelola oleh kader-kader sukarela yang mendapatkan pelatihan dasar kesehatan, dan mendapat dukungan dari Puskesmas.

Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program utama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). KB merupakan salah satu program nasional untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja.

Kasus Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat mengancam yang menimbulkan kerugian fisik, mental, psikologi, seksual, maupun sosial seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, terutama pada kelompok Perempuan.





METADATA

PROFIL GENDER DAN ANAK

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Merupakan zat terlarang yang mempengaruhi sistem saraf, suasana hati, kesadaran bahkan perilaku seseorang. Penggunaan NAPZA dapat berdampak pada kecanduan dan ketergantungan.

Penyalahgunaan NAPZA

Jumlah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.





BAB I PENDAHULUAN



2025

LATAR BELAKANG

Pemerintah secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan kualitas hidup manusia demi mencapai kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Upaya ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, dalam proses perkembangannya, masih ditemui ketimpangan dan ketidakadilan gender yang lebih banyak dialami oleh perempuan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menghapuskan hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda). Sesuai dengan Inpress nomor 9/2000, PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan PUG di instruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota. Strategi ini dilaksanakan untuk integrasi analisis gender dalam penyusunan program serta mengakomodasi kebutuhan, pengalaman dan aspirasi perempuan dan laki-laki dalam setiap tahap pembangunan.

Untuk mendukung kegiatan PUG secara efektif, data gender menjadi elemen penting yang harus tersedia. Data gender adalah data yang menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan, serta prioritasnya, sehingga dapat dirumuskan isu gender. Melalui data gender ini selain dapat dirumuskan isu gender, dapat pula sebagai bahan pengambilan keputusan berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen No.4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak.

Data terpilah menurut jenis kelamin bermanfaat untuk mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Pasca era Millenium Development Goals (MDGs), isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan pada Sustainable Goals (SDGs). Adapun tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi karena bias gender yang belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Selain itu, kelembagaan PUG dan jaringan perlindungan anak yang masih lemah, serta ketersediaan data terpilah yang belum merata diseluruh wilayah.

Oleh karena itu, penguatan sistem data, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan komitmen seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender dan ramah anak.

DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang mengacu tentang kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak diantaranya;

1. Peraturan Presiden 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender;
4. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Satu Data Gender dan Anak;
7. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No 463/155/DP3AP2KB /IV/2024 tentang Pedoman pelaksanaan rencana Aksi daerah pengarusutamaan gender bagi pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat tahun 2024;



MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan "Profil Gender dan Anak Tahun 2025" **dimaksudkan untuk** melihat pemerataan pembangunan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang yang berbasis data terpilah yang menggambarkan capaian pembangunan, permasalahan pembangunan dan upaya-upaya yang telah dan masih diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara lebih khusus, **penyusunan Profil Gender dan Anak di Kota Padang tahun 2025 memiliki tujuan;**

1. Tersedianya data terpilah Perempuan dan Anak di bidang Pendidikan, kesehatan, Ekonomi, Peran Perempuan di sektor publik, dan bidang-bidang yang menjadi isu Perempuan dan Anak di Kota Padang.
2. Tersedianya data kebijakan, program, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dan elemen masyarakat Kota Padang terkait upaya pemberdayaan perempuan di Kota Padang.
3. Tersedianya hasil analisis deskriptif tentang capaian pemberdayaan perempuan di Kota Padang, Analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data primer dan sekunder untuk melihat pencapaian indikator pemberdayaan Gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki di sektor Publik, bidang Pemerintahan, posisi di Parlemen, dan dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Padang.
4. Mendorong pemanfaatan data gender dan anak untuk, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Padang.

SUMBER DATA

Data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan anak Kota Padang Tahun 2025 diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang, Instansi Vertikal di Kota Padang yang tergabung dalam Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Padang Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 374 tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024.

SISTEMATIKA PENULISAN

Profil Gender dan Anak Kota Padang Tahun 2025 disusun dalam 10 bab yang menggambarkan kondisi perempuan, anak dan masyarakat Kota Padang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penulisan profil Gender dan Anak Kota Padang, lebih spesifik diperjelas dengan landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Maksud dan tujuan diperuntukkan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah dilaksanakan terhadap perempuan dan anak.

Bab II Gambaran Umum Wilayah

Memuat tentang gambaran letak geografis, batas administrasi wilayah serta visi dan misi Kota Padang.

Bab III Struktur Kependudukan

Dalam bab ini memuat informasi tentang kependudukan berdasarkan jenis kelamin, penduduk produktif, penyebaran penduduk, kepemilikan KTP, akta kelahiran, Kartu Keluarga, penduduk miskin, status perkawinan dan Kepala keluarga perempuan.

Bab IV Konstruksi Gender

Pada bab ini dijelaskan tentang pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Padang dan dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi Sumatera Barat dan beberapa tahun terakhir.



Bab V Gender dan Anak Bidang Pendidikan

Memuat kondisi pendidikan di Kota Padang menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Kemudian diuraikan dengan angka terkait berdasarkan angka usia angka partisipasi sekolah, dan angka partisipasi murni. Angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah dan Guru Honorer

Bab VI Gender dan Anak Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Pada umum ini disampaikan data terkait angka kematian ibu, penyebab kematian serta upaya yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Padang untuk peningkatan status kesehatan di Kota Padang, Data HIV AIDS, Keluarga Berencana. usia Perkawinan Pertama serta Penggunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)

Bab VII Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Bab ini menjelaskan tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Status Pekerjaan, lapangan Usaha, pekerja sektor formal dan informal, Usaha Mikro dan Kecil (UKM), Koperasi dan keterlibatan perempuan di sektor ekonomi lainnya.

Bab VIII Bidang Hukum dan Sosial Budaya

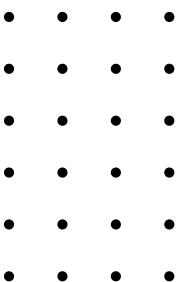
Bab ini menjelaskan tentang kasus terkait hukum, kebijakan terkait dengan pengarusutamaan gender dan anak serta kebijakan yang responsif gender, kebijakan terkait perempuan dan anak, lembaga yang terkait peduli perempuan dan anak, serta data terkait bidang sosial dan budaya.

Bab IX Bencana Alam

Bagian ini menjelaskan tentang bencana yang pernah terjadi di Kota Padang selama tahun 2024

Bab X Penutup

Memuat kesimpulan dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan menuju pemerataan keadilan bagi perempuan dan anak di kota Padang



BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH



PROFIL GENDER DAN ANAK 2025

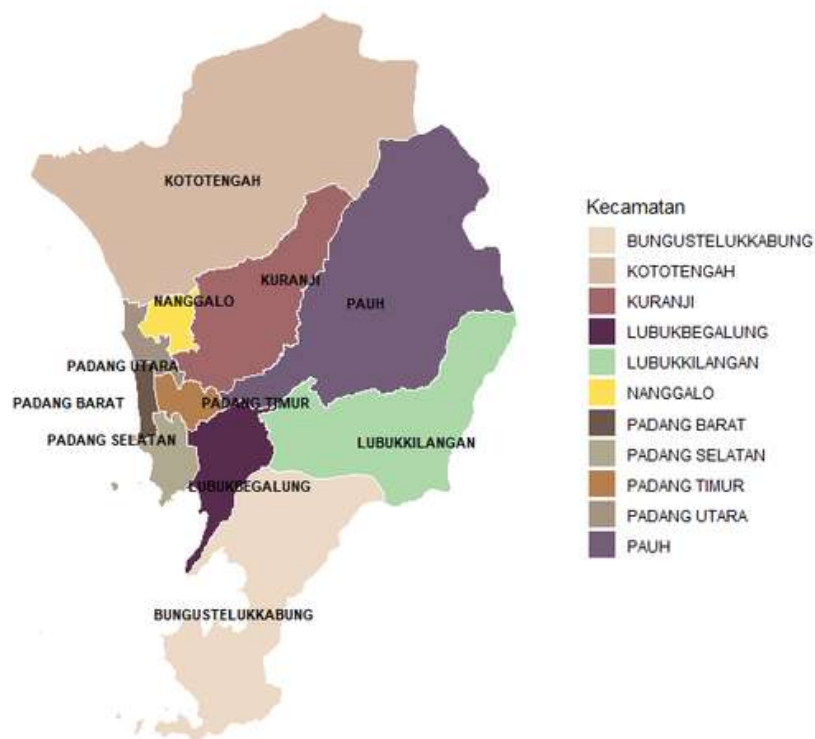


LETAK GEOGRAFIS

Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, yang terletak di pesisir pantai Barat pulau Sumatera. **Luas kawasan daratan** Kota Padang adalah **694,96 km²** sedangkan kawasan perairan/laut luasnya 720,00 km². Secara administratif, Kota Padang memiliki luas wilayah 1.414,96 km², dengan posisi astronomis antara 1000 05'05 BT-1000 34'09" BT dan 000 44'00" LS- 01008'35" LS.

21 SUNGAI

5 diantaranya merupakan sungai besar, dan sungai terpanjang adalah **sungai Batang Kandis** dengan panjang ± 20 Km.



Gambar 1. Peta Kota Padang

Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980** tanggal 21 Maret 1980, wilayah Kota Padang yang sebelumnya terdiri dari **3 Kecamatan** dengan 15 Kampung, selanjutnya dikembangkan menjadi **11 Kecamatan** dan **193 Kelurahan**

NAMUN



seiring dengan penggabungan kelurahan dan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005, maka Kota Padang memiliki **104 Kelurahan**

Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi, terdiri dari dataran tinggi/perbukitan, dataran rendah, daerah aliran sungai serta mempunyai pulau-pulau dan pantai. Sebagian besar topografi wilayah Kota Padang memiliki tingkat kemiringan lahan rata-rata > 40%. Ketinggian wilayah Kota Padang dari permukaan laut juga bervariasi, mulai dari 0 di atas permukaan laut (dpl) sampai > 1.000 m dpl. Kota Padang memiliki suhu dan kelembaban yang cukup tinggi, karena posisinya yang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera.



Berdasarkan posisi wilayahnya, Kota Padang memiliki wilayah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Wilayah Pantai; seluruhnya berhadapan dengan Samudera Hindia.
2. Wilayah Dataran Rendah, sebagian besar sudah berkembang sebagai daerah pusat kota.
3. Wilayah Dataran tinggi; berupa lereng Bukit Barisan melingkari Kota Padang

BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

VISI KOTA PADANG

Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (*smart city*) dan kota sehat berlandaskan agama dan budaya, menuju kota yang maju dan sejahtera

MISI KOTA PADANG

- 01 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Responsif, Inovatif dan Partisipatif
- 02 Memperkuat pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat
- 03 Penguatan Masyarakat yang Beragama dan Berbudaya melalui Pendidikan karakter
- 04 Mendorong kemudahan berinvestasi demi terbukanya Lapangan Pekerjaan
- 05 Mewujudkan Pembangunan dan revitalisasi Sarana dan Prasarana Umum yang Hijau dan Berkualitas
- 06 Memperkuat jaringan ketahanan Bencana
- 07 Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang adaptif dan kondusif melalui penguatan sektor jasa, Perdagangan, Pertanian dan Perikanan
- 08 Menggerakkan potensi Kota untuk terwujudnya Industri Kreatif dan Pariwisata berkelanjutan

BAB III

STRUKTUR

KEPENDUDUKAN



PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG

PENDUDUK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menetap atau berdomisili baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara permanen di suatu wilayah. Penduduk memiliki peran penting dalam pembangunan, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk, optimalisasi potensi penduduk agar tercipta kemajuan wilayah baik di bidang sosial, ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN



Pada Tahun 2024, Kota Padang memiliki **946.982 penduduk**. Penduduk ini tersebar di 11 kecamatan, dengan **proporsi gender relatif seimbang**.

Koto Tangah menjadi kecamatan dengan **jumlah penduduk terbanyak dan wilayah terluas**, sebanyak **21,93%** penduduk Kota Padang tinggal di wilayah ini

Koto Tangah



Kecamatan **Padang Timur** menjadi kecamatan **terpadat** di Kota Padang saat ini. Dengan luas wilayah hanya 8,15 km², kecamatan ini mampu menampung sekitar **9.994 penduduk per kilometer persegi wilayahnya**. Sebaliknya **Bungus Teluk Kabung** memiliki **kepadatan penduduk terendah, yaitu sekitar 288 jiwa per kilometer persegi**. Hal ini menunjukkan **belum meratanya sebaran penduduk di Kota Padang pada Tahun 2024**.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Penduduk	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	14.795	14.222	29.017	100, 78	287, 92
2	Lubuk Kilangan	29.171	29.056	58.227	85, 99	667, 14
3	Lubuk Begalung	62.561	63.002	125.563	30, 91	4.062, 21
4	Padang Selatan	30.969	31.159	62.128	10, 03	6.194,22
5	Padang Timur	40.366	41.09	81.456	8, 15	9.994,60
6	Padang Barat	21.377	21.972	43.349	7, 00	6.192,71
7	Padang Utara	29.886	29.948	59.834	8, 08	7.405,20
8	Nanggalo	30.386	31.053	61.439	8, 07	7.631,26
9	Kuranji	76.938	76.472	153. 410	54, 41	2.672,18
10	Pauh	32.56	32.259	64.819	146, 29	443, 09
11	Koto Tangah	103.661	104.079	207. 740	232, 25	894, 47

Sumber: BPS, 2024



LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Penduduk di Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya.

Table 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Padang 2024

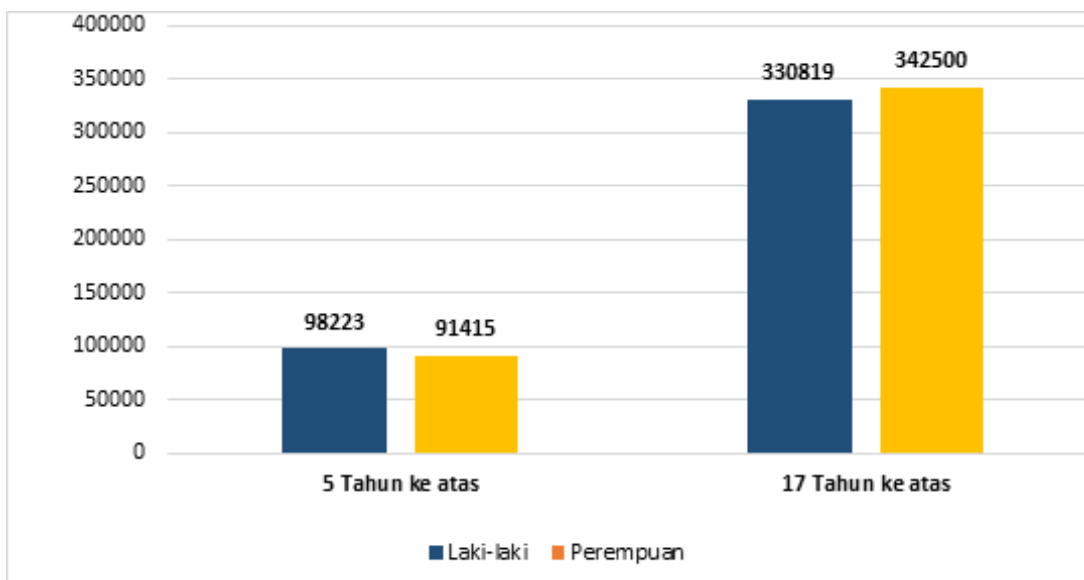
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk
		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	28. 690	29. 017	1, 13
2	Lubuk Kilangan	57. 999	58. 227	0, 39
3	Lubuk Begalung	124. 145	125. 563	1, 14
4	Padang Selatan	62. 069	62. 128	0, 10
5	Padang Timur	80. 844	81. 456	0, 75
6	Padang Barat	43. 417	43. 349	-0, 16
7	Padang Utara	59. 212	59. 834	1, 04
8	Nanggalo	60. 570	61. 439	1, 42
9	Kuranji	150. 419	153. 410	1, 97
10	Pauh	63. 642	64. 819	1, 83
11	Koto Tangah	203. 840	207. 740	1, 90

Sumber: Disdukcapil, 2024

Dari data yang tersaji terlihat bahwa Laju pertumbuhan penduduk di tiap kecamatan merata, yaitu **sekitar 1% pertahun**

KEPEMILIKAN NIK DAN AKTA KELAHIRAN UNTUK ANAK

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 5 yaitu "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan" dan pasal 27 ayat 1 yaitu "identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya". Identitas anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran dan kartu keluarga. Dokumen tersebut merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap warga negaranya. Capaian kepemilikan NIK usia 5 tahun keatas dapat dijadikan indikator penting dalam melihat kinerja sistem pencatatan administrasi kependudukan.



Gambar 2. Penduduk Yang Memiliki Nomor Induk Kependidikan (NIK) Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2024

Berdasarkan data dari Disdukcapil tahun 2024, proporsi kepemilikan **NIK** pada penduduk **usia 5 tahun ke atas didominasi oleh laki-laki**. Sebaliknya, pada kelompok usia **17 tahun ke atas, perempuan** tercatat memiliki NIK dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Angka kepemilikan NIK pada tahun 2024 **mengalami penurunan** dibandingkan tahun 2023, yang tercatat sebanyak 192.265 jiwa.



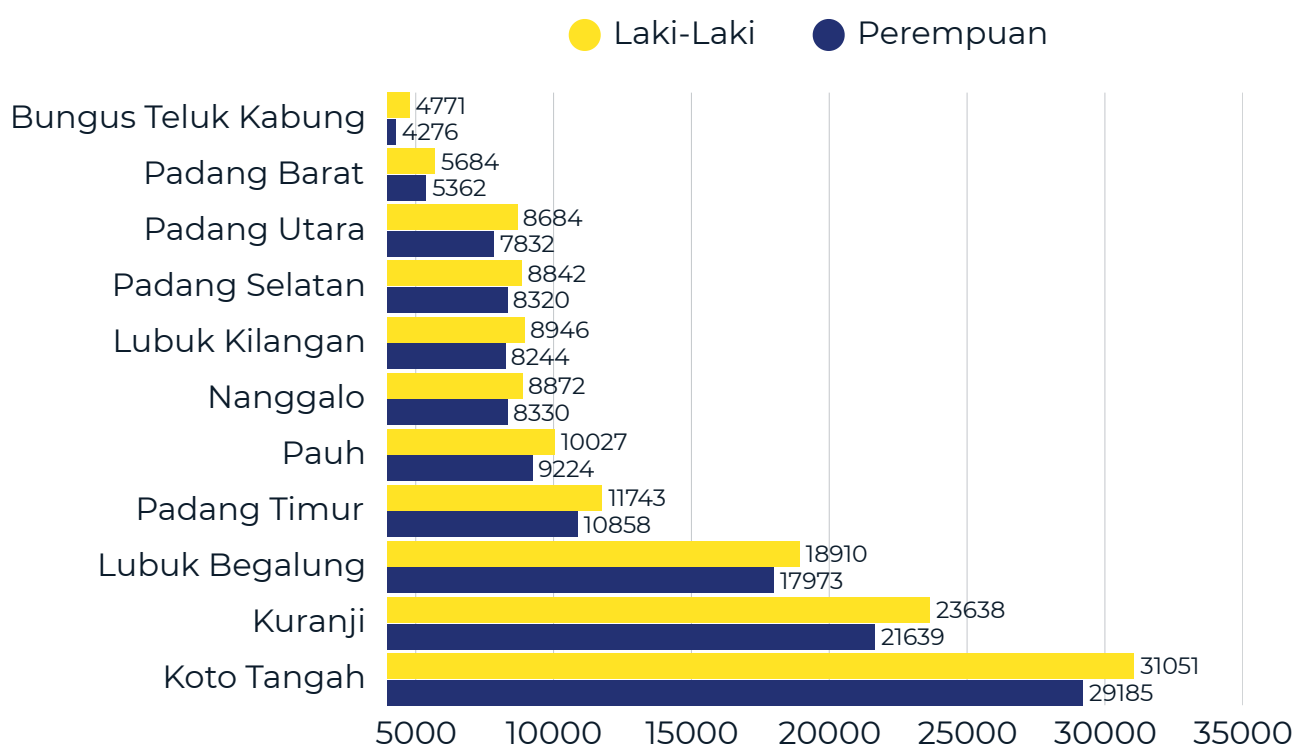
Akta Kelahiran

dimiliki oleh **272.411 penduduk** dari total **287.585 penduduk** pada kelompok usia **0-18** tahun, sehingga **5,27 % anak** belum memiliki akta kelahiran

Jumlah **laki-laki** yang berusia 0-18 tahun dan telah memiliki akta kelahiran **terdata sebanyak 141.168 jiwa, lebih banyak** dibandingkan jumlah **anak perempuan** pada kelompok usia yang sama, yaitu sebanyak **131.242 jiwa**



Dari seluruh anak dalam rentang usia tersebut yang telah memiliki akta, sebanyak **22,11% berdomisili di Kecamatan Koto Tangah**, diikuti oleh Kecamatan Kuranji dan Lubuk Begalung. Sementara Kecamatan Bungus Teluk Kabung menjadi kecamatan paling sedikit yang memiliki penduduk berusia 0-18 yang telah memiliki akta.



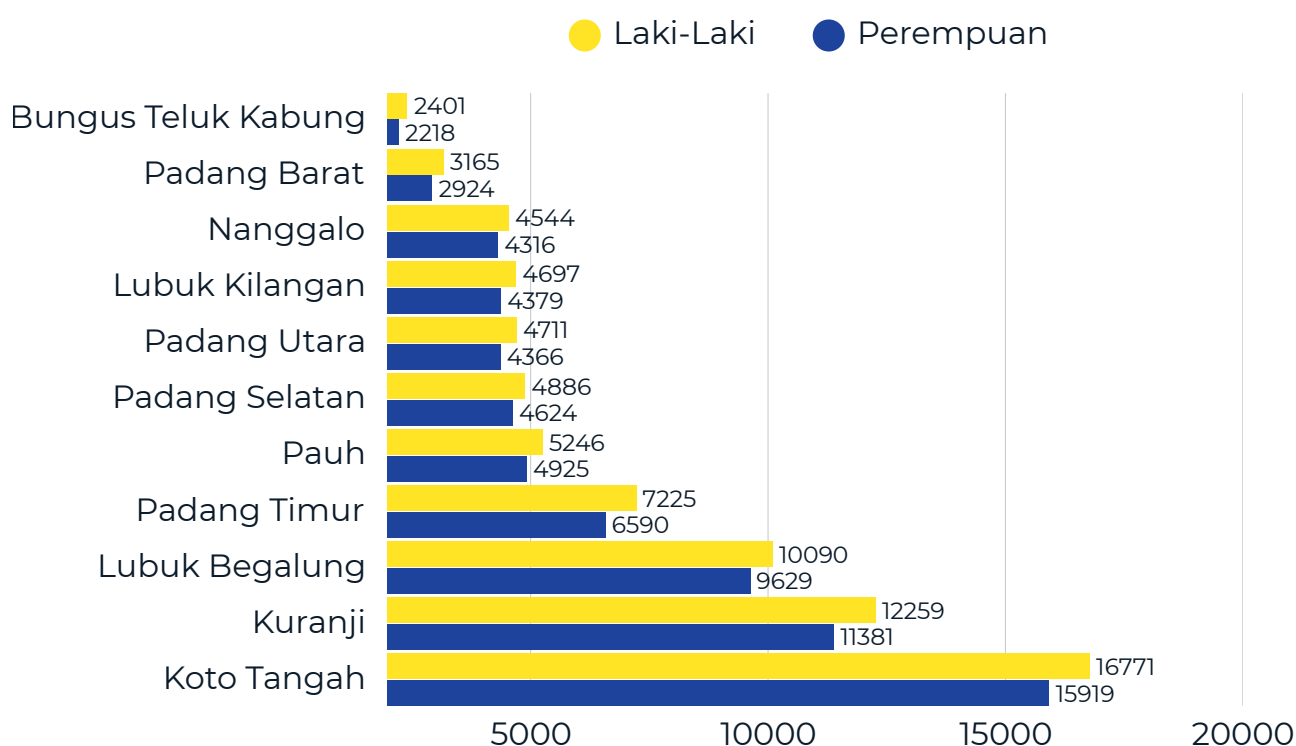
Gambar 3. Jumlah kepemilikan akta kelahiran Kota Padang 2024

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk yang memiliki **akta kelahiran meningkat sebesar 0,12%**. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan legal sebagai bukti identitas seseorang sejak lahir.



KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Selain akta kelahiran, dokumen legal yang dapat dimiliki anak adalah **Kartu Identitas Anak (KIA)**. KIA merupakan **identitas resmi bagi anak usia 0 hingga 17 tahun kurang 1 hari** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).



Gambar 4. Jumlah kepemilikan KIA Kota Padang 2024

Berdasarkan data Disdukcapil tahun 2024, terdapat **147.266 anak** di Kota Padang yang telah **memiliki KIA**, dengan **proporsi anak laki-laki yang lebih tinggi**. Jumlah ini mengalami **peningkatan** dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 125.606 anak.

17,24%



Kenaikan jumlah kepemilikan KIA dari tahun sebelumnya

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP

Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk berusia 17 tahun ke atas. Saat ini, identitas kependudukan sudah menggunakan KTP elektronik, yaitu **kartu identitas yang dilengkapi dengan chip berisikan data biometrik dan identitas pribadi penduduk, diterbitkan secara resmi oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan berlaku secara nasional**

Tabel 3. Rekapitulasi Data Kepemilikan KTP-el Kota Padang Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP Elektronik	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bungus Teluk Kabung	29017	20055	20014	99, 80
2	Lubuk Kilangan	58227	41317	41211	99, 74
3	Lubuk Begalung	125563	89549	89282	99, 70
4	Padang Selatan	62128	45382	44978	99, 11
5	Padang Timur	81456	59547	59265	99, 53
6	Padang Barat	43349	32687	32453	99, 28
7	Padang Utara	59834	43812	43654	99, 64
8	Nanggalo	61439	44837	44754	99, 81
9	Kuranji	153410	109559	109249	99, 72
10	Pauh	64819	46112	45831	99, 39
11	Koto Tengah	207.74	149.157	148.612	99, 63

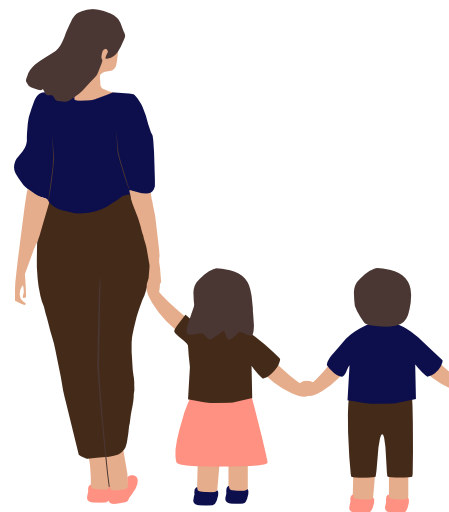
Sumber: Disdukcapil, 2024

Berdasarkan Tabel 3 , dari 11 kecamatan di Kota Padang, terlihat bahwa hampir seluruh penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai wajib KTP telah memiliki KTP elektronik. Tingkat kepemilikan e-KTP pada tahun **2024 tercatat mencapai 99,58%, mengalami peningkatan** dibandingkan tahun **2023** yang berada pada **angka 97,15%**.

Capaian ini mencerminkan adanya **peningkatan, dan keberhasilan dalam pelayanan** administrasi kependudukan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya identitas resmi.

KEPALA KELUARGA PEREMPUAN

Kepala keluarga merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga, baik dalam pengambil maupun pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi. Kepala keluarga tidak hanya dapat diisi oleh laki-laki saja tetapi perempuan pun juga dapat berperan sebagai kepala keluarga. Peran kepala keluarga sangatlah besar dalam mengambil keputusan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan dan kondisi sosial di suatu daerah.





Tahun 2024, sekitar **satu per lima kepala keluarga di Kota Padang adalah perempuan.**

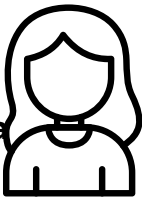
78,63%

Kepala keluarga laki-laki



21,37%

Kepala keluarga Perempuan



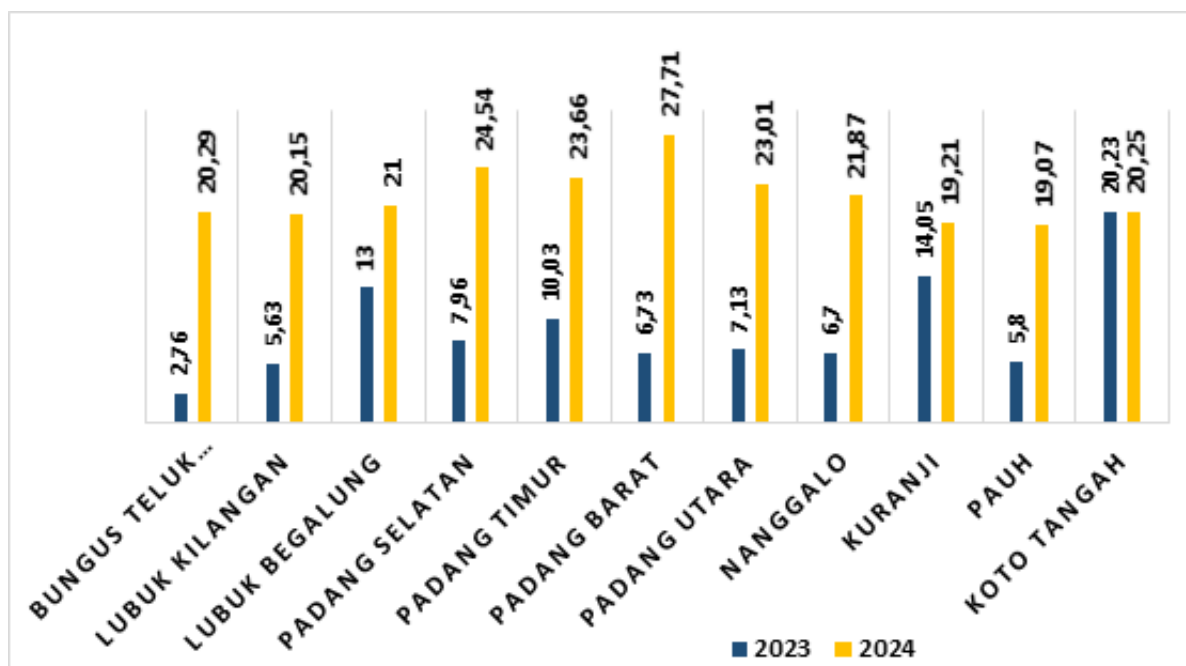
Tabel 4. Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bungus Teluk Kabung	6 880	79, 71	1 751	20, 29	8 631	2, 93
2	Lubuk Kilangan	14 130	79, 85	3 566	20, 15	17 696	6, 00
3	Lubuk Begalung	30 744	79, 00	8 174	21, 00	38 918	13, 20
4	Padang Selatan	15 304	75, 46	4 976	24, 54	20 280	6, 88
5	Padang Timur	20 184	76, 34	6 257	23, 66	26 441	8, 96
6	Padang Barat	10 843	72, 29	4 156	27, 71	14 999	5, 09
7	Padang Utara	14 905	76, 99	4 455	23, 01	19 360	6, 56
8	Nanggalo	15 084	78, 13	4 222	21, 87	19 306	6, 55
9	Kuranji	37 450	80, 79	8 903	19, 21	46 353	15, 72
10	Pauh	15 655	80, 93	3 690	19, 07	19 345	6, 56
11	Koto Tangah	50 726	79, 75	12 881	20, 25	63 607	21, 57
Kota Padang		231 905	78, 63	63 031	21, 37	294 936	100

Sumber: Disdukcapil, 2024

Dari 11 kecamatan di Kota Padang, **Persentase kepala keluarga perempuan tertinggi adalah di kecamatan Padang Barat**, yaitu sebesar **27,71%**. Artinya, lebih dari seperempat kepala keluarga di Kecamatan tersebut adalah perempuan, **yakni sebanyak 4156 dari 14.999 kepala keluarga di Padang Barat adalah perempuan**

Berdasarkan data dari Buku Profil Gender dan Anak tahun 2024, terdapat **peningkatan persentase** kepala keluarga berjenis kelamin perempuan pada tahun 2024 di sebagian besar kecamatan. **Peningkatan terkecil terjadi di Kecamatan Koto Tengah**, yaitu dari 20,23% pada tahun 2023 menjadi 20,25% pada tahun 2024, atau naik sebesar 0,02 poin persentase.



Gambar 5. Persentase kepala keluarga perempuan di Kota Padang tahun 2023 dan 2024

Dari data dari
Disdukcapil di
Kota Padang
tahun

2023 DAN 2024

Persentase kepala keluarga perempuan **meningkat dari tahun sebelumnya**

Namun, hal ini menunjukkan bahwa **perempuan dapat mengambil peran dalam berkehidupan keluarga dan masyarakat.**

Pada tahun 2024, jumlah kepala **keluarga perempuan adalah sebanyak 63.031 keluarga**, dan sebanyak 231.905 keluarga dipimpin oleh kepala keluarga laki-laki. Kelompok **kepala keluarga laki-laki paling banyak berada di usia 40-44**, dan pada kelompok usia selanjutnya, angka keluarga yang dipimpin oleh laki-laki **semakin menurun**.

Kepala keluarga laki-laki termuda ada pada rentang usia 5-9 tahun, sebanyak 1 orang dan pada usia 10-14 tahun sebanyak satu orang. Keberadaan kepala keluarga laki-laki di bawah umur 15 tahun ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan dan pihak terkait.

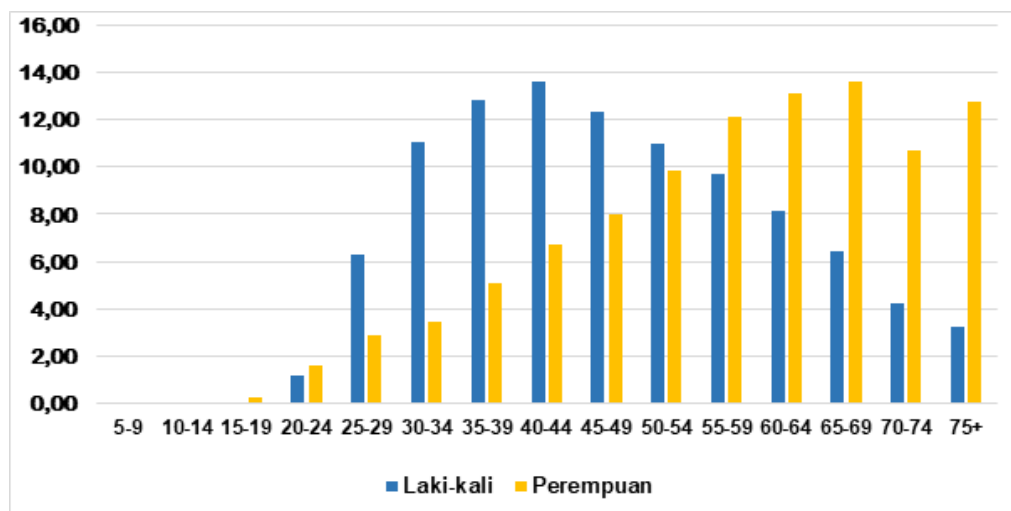
Sementara itu, **jumlah kepala keluarga wanita konsisten meningkat sampai kelompok usia 65-69 tahun**. Kelompok usia ini menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak pada tahun 2024. Artinya **wanita yang menjadi kepala keluarga terbanyak berada pada rentan usia tua yaitu di usia 65- 69 tahun**. Selain itu, untuk kelompok usia 75+, jumlah wanita yang menjadi kepala keluarga adalah sebanyak 12,37% dari seluruh kepala keluarga wanita.



Tabel 5. Persentase Kepala Keluarga berdasarkan kelompok Umur di Kota Padang 2024

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 - 9	1	0, 00	0	0, 00	1	0, 00
10 - 14	1	0, 00	2	0, 00	3	0, 00
15-19	193	0, 08	168	27	361	0, 12
20-24	2 722	1, 17	1 024	1, 62	3 746	1, 27
25-29	14 580	6, 29	1 812	2, 87	16 392	5, 56
30-34	25 616	11, 05	2 167	3, 44	27 783	9, 42
35-39	29 659	12, 79	3 206	5, 09	32 865	11, 14
40-44	31 461	13, 57	4 220	6, 70	35 681	12, 10
45-49	28 636	12, 35	5 037	7, 99	33 673	11, 42
50-54	25 498	11, 00	6 200	9, 84	31 698	10, 75
55-59	22 519	9, 71	7 637	12, 12	30 156	10, 22
60-64	18 799	8, 11	8 241	13, 07	27 040	9, 17
65-69	14 948	6, 45	8 581	13, 61	23 529	7, 98
70-74	9 768	4, 21	6 713	10, 65	16 481	5, 59
75+	7 504	3, 24	8 023	12, 73	15 527	5, 26
Jumlah	231 905	100	63 031	100	294 936	100

Sumber: Disdukcapil, 2024



Gambar 6. Persentase kepala keluarga berdasarkan kelompok Umur di Kota Padang 2024

BAB IV

KONSTRUKSI GENDER

2025



APA ITU GENDER



Gender merupakan konsep sosial dan budaya yang menggambarkan perbedaan peran, tanggung jawab, kedudukan, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dari jenis kelamin yang bersifat biologis, gender terbentuk melalui proses sosial dan kultural yang berkembang dalam masyarakat.

Ketidakadilan gender timbul ketika struktur sosial dan sistem yang berlaku memberikan perlakuan tidak setara, sehingga baik perempuan maupun laki-laki bisa menjadi korban dari ketimpangan tersebut. Walaupun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kodrat secara biologis, hal itu tidak seharusnya menjadi dasar untuk membatasi peran sosial mereka. **Keadilan gender** dapat dicapai ketika perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama, serta dapat berpartisipasi secara setara dalam semua aspek kehidupan secara adil, seimbang, dan harmonis.

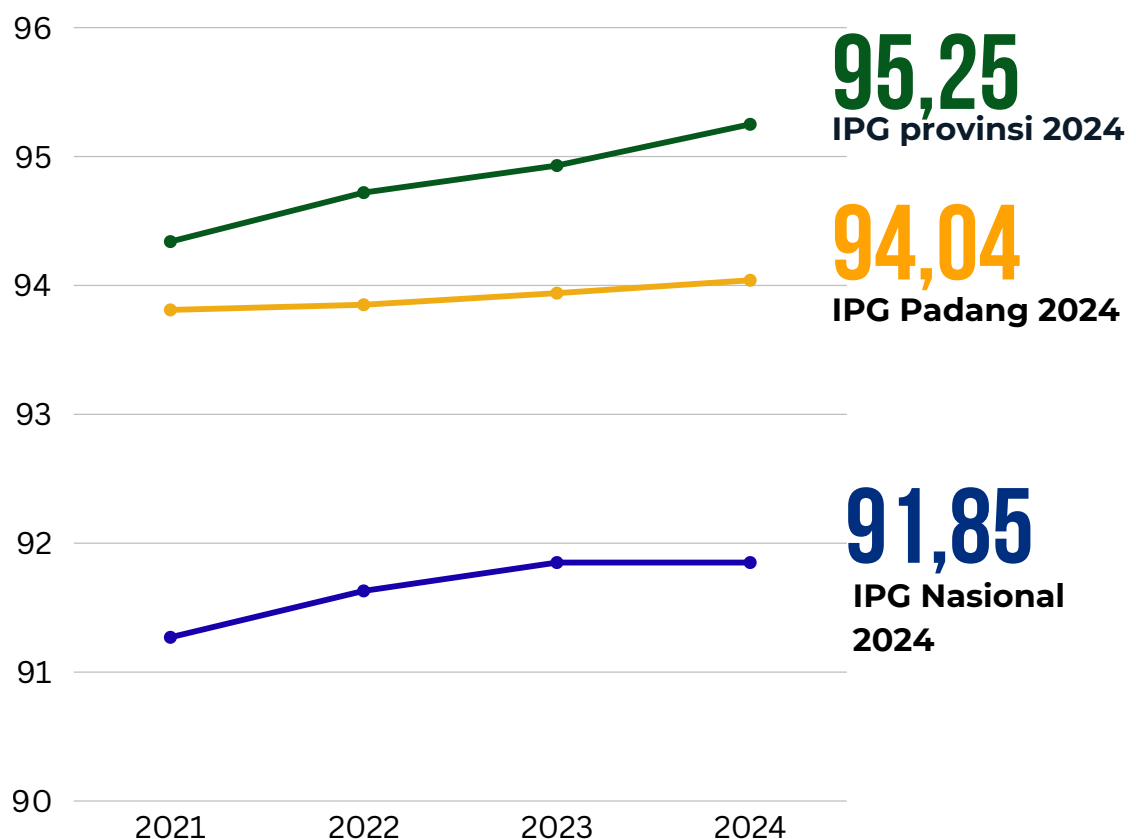


INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

IPG di Kota Padang menunjukkan **tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir**. Pada tahun 2024, IPG Kota Padang mencapai **94,04**. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sudah relatif setara, dengan **selisih ketimpangan sebesar 5,96 poin**. Artinya, kesenjangan gender dalam pembangunan manusia **berhasil dipersempit**.



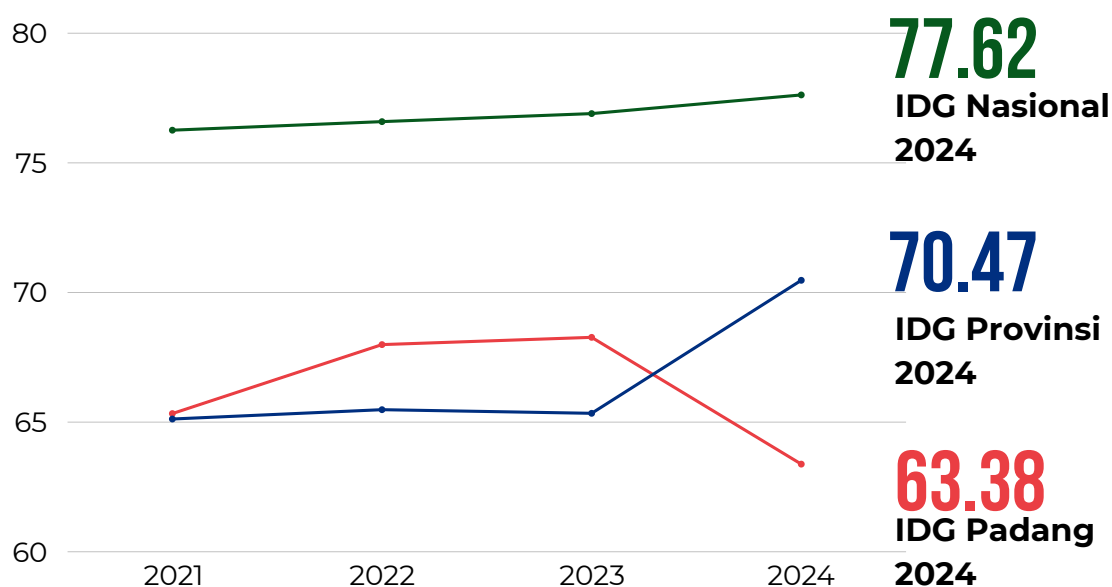
Gambar 7. Indeks Pembangunan Gender Kota Padang 2024



Sementara, IPG Provinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 95,25 dan IPG nasional sebesar 91,85 pada tahun yang sama. Ini menunjukkan bahwa baik di tingkat provinsi maupun **nasional, pembangunan manusia berbasis gender terus mengalami perbaikan**, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan menuju kesetaraan yang utuh.

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender digunakan sebuah indeks komposit, yaitu **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. IDG mengukur sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi dengan indikator keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan. Berdasarkan data yang di peroleh dari BPS (2024), terlihat bahwa **IDG kota Padang mengalami penurunan dari tahun lalu**. Hal ini menunjukkan berkurangnya kontribusi perempuan baik di perlamen, tenaga profesional maupun sumbang pendapat.



Gambar 8. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Padang 2024

BAB V

BIDANG PENDIDIKAN

2025

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG





Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Pendidikan merupakan tolak ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Pendidikan layak bagi setiap penduduk akan berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, serta bias-bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti angka melek huruf, status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada kemampuan pola. pikir dan tingkat kesejahteraannya.

Terbukanya peluang meraih pendidikan yang sama antara laki-laki dan perempuan akan berdampak pada pembangunan masyarakat, sosial dan ekonomi. Selain itu, dengan pendidikan yang dimiliki, perempuan dapat mengambil peran dalam masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan mendidik anak-anak berkualitas.

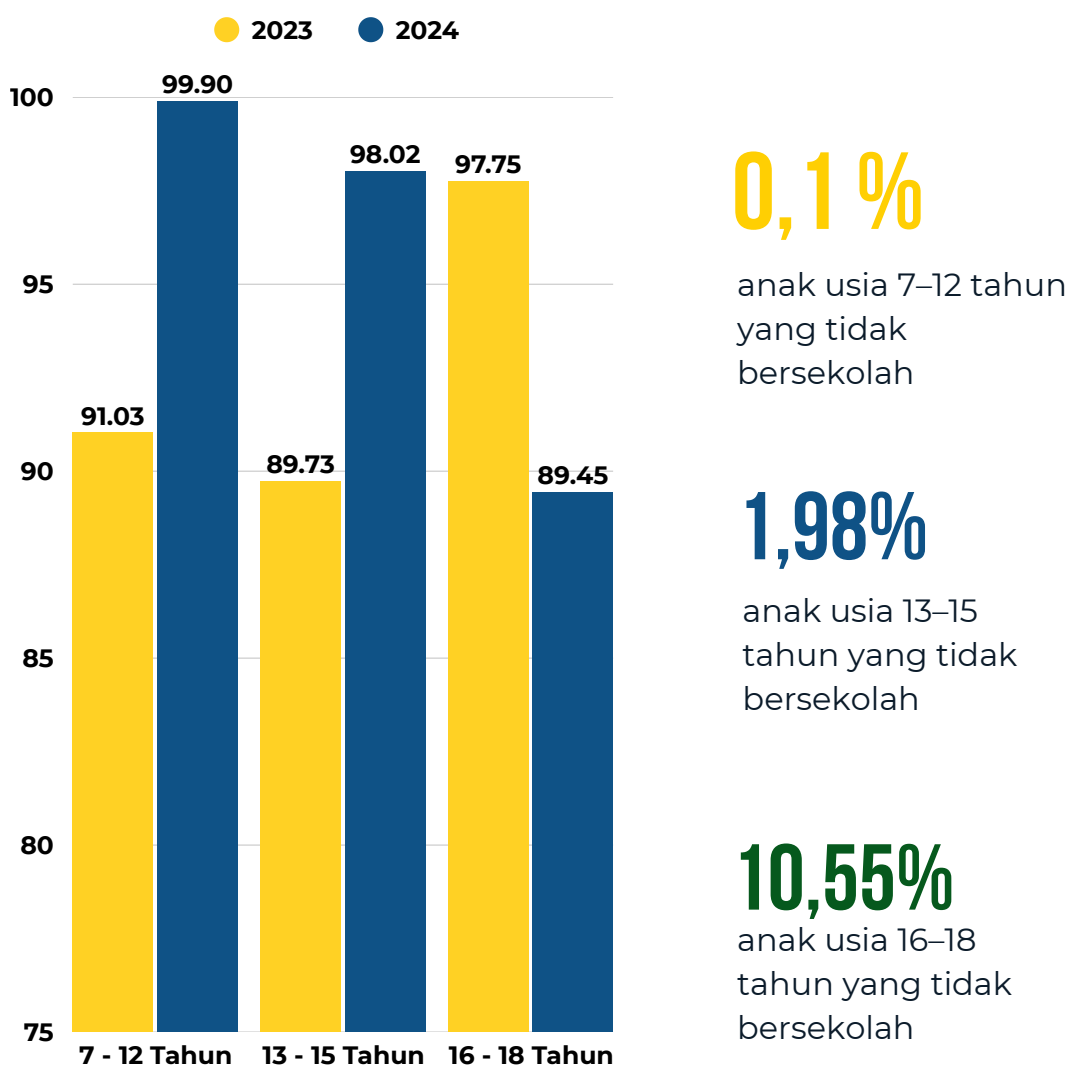
Data dan informasi yang dihasilkan diharapkan akan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu pengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gambaran mengenai pendidikan pada bab ini antara lain mencakup Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan angka melek huruf

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah. APS memberikan gambaran **seberapa banyak kelompok usia sekolah yang masih bersekolah**, baik perempuan maupun laki-laki. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2030. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs. **Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan**



Berdasarkan data BPS (2024) yang ditampilkan pada Gambar 8, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Padang **menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, pada kelompok usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun**. Namun, **tren ini tidak berlanjut pada kelompok usia 16–18 tahun**, yang justru mengalami **penurunan dibandingkan dengan tahun 2023**. Meskipun demikian, **APS kelompok usia ini masuk kriteria cukup tinggi**.



Gambar 9. Angka Partisipasi Sekolah Kota Padang

ANGKA PARTISIPASI KASAR

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK dapat melebihi 100% karena adanya siswa yang lebih muda atau lebih tua dari rentang usia ideal.

Selain untuk menunjukkan seberapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan pada umumnya, APK juga berkaitan dengan angka partisipasi murni (APM) dan digunakan menunjukkan kapasitas sistem pendidikan dalam menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.

Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar Kota Padang Tahun 2024

SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
110, 54	110, 29	97, 44

Sumber : Dinas Pendidikan, 2024



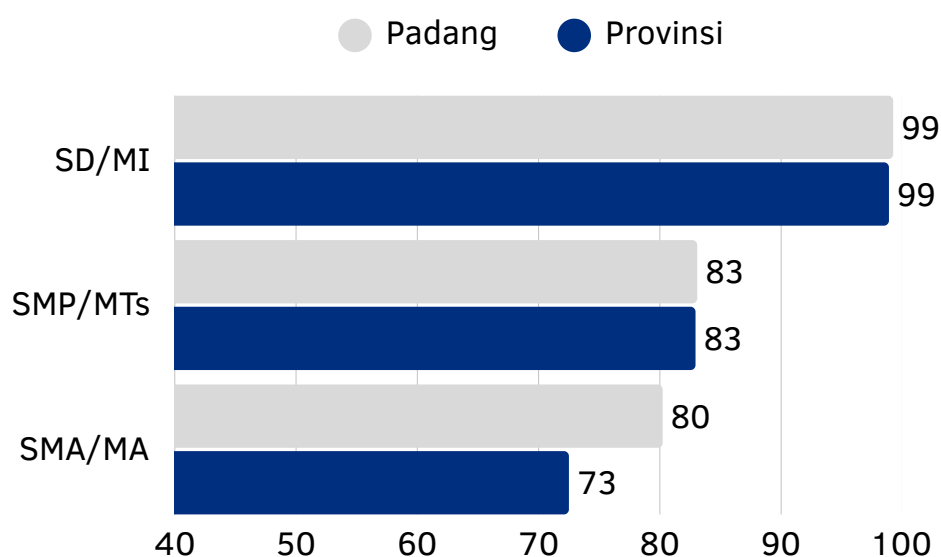
APK untuk jenjang **SD/MI dan SMP/MTs** tercatat **melebihi 100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa **terdapat siswa yang bersekolah di jenjang tersebut meski berada diluar rentang usia ideal, baik yang berusia lebih muda atau lebih tua.**

2,56%
tidak bersekolah di
jenjang tersebut SMA



ANGKA PARTISIPASI MURNI

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan persentase anak pada kelompok usia sekolah tertentu (7 tahun sampai 18 tahun) yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. **APM Berbeda dengan APK**, dimana APK menggambarkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, nilai APK bisa melebihi 100% karena ada anak yang bersekolah tidak pada rentang usianya. Sementara itu, APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dan sesuai usianya, sehingga nilai APM maksimal 100% yang menggambarkan bahwa semua anak di rentang usia tertentu sudah bersekolah di level sesuai umurnya.



Gambar 10. Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kota Padang dan Provinsi 2024

Berdasarkan data BPS (2024) yang disajikan pada Gambar 10, terlihat bahwa **APM Kota Padang untuk semua tingkat pendidikan telah melampaui APM Provinsi Sumatera Barat**. APM untuk **tingkat sekolah dasar (SD/MI) sudah mendekati sempurna**, mendekati 100%. Hal ini menunjukkan hampir seluruh anak diusia pendidikan SD sudah mengenyam pendidikan di tingkat tersebut. **Hanya sekitar 0,76% anak usia SD yang belum bersekolah di jenjang SD/MI, atau sekitar dengan 1 dari setiap 132 anak usia sekolah dasar.**

Sementara itu, **tercatat bahwa 16,92% penduduk usia pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) belum bersekolah di jenjang tersebut**. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), angka tersebut lebih tinggi, yakni **19,77%**.

Secara umum, APM Kota Padang untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs **mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya**. Namun, **tren yang berbeda terjadi pada jenjang SMA/MA, di mana APM justru menunjukkan penurunan**.

TINGKAT MELEK HURUF

Pengukuran angka melek huruf digunakan dalam terminologi BPS untuk kemampuan membaca dan menulis penduduk. Angka melek huruf menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca, tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya.



Tingkat melek huruf penduduk Kota Padang tahun 2024 **telah melebihi 99%**. Persentase melek huruf antara laki-laki dan perempuan **tidak berbeda signifikan**, dengan **selisih sebesar 0,22%**, dimana angka melek huruf laki-laki sedikit lebih tinggi dari perempuan (BPS, 2024)



Laki-laki

Dari 472.670 penduduk laki-laki, sekitar 471.536 orang juga telah memiliki kemampuan baca-tulis.



Perempuan

Dari total 474.312 penduduk perempuan, sebanyak 472.130 orang telah mampu membaca dan menulis.

Gambar 11. Persentase Angka Melek Huruf Kota Padang 2024

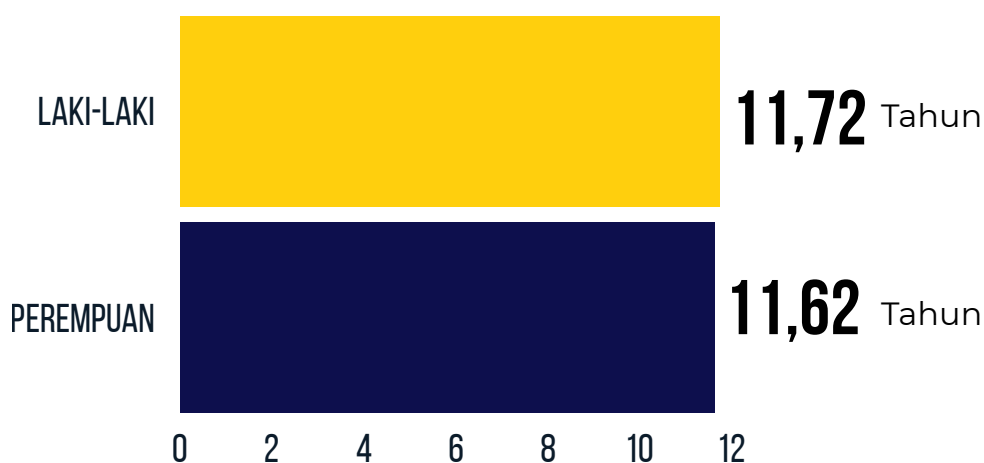
Kondisi ini menunjukkan bahwa **kemampuan literasi antara laki-laki dan perempuan di Kota Padang sudah berimbang**, yang mencerminkan **kesempatan belajar dan akses terhadap pendidikan di Kota Padang relatif setara di antara laki-laki dan perempuan**.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka melek huruf pada **laki-laki mengalami peningkatan pada tahun ini**. Sementara itu, **terjadi sedikit penurunan pada perempuan**, di mana tingkat melek huruf perempuan pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 99,62%

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa lama seseorang menempuh pendidikan formal. Menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Umumnya, seorang siswa akan menghabiskan waktu selama 9 tahun untuk menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau sederajat, dan 12 tahun untuk menyelesaikan tingkat SMA atau sederajat.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Padang tahun **2024** tercatat **sebesar 11,72 tahun untuk laki-laki dan 11,62 tahun untuk perempuan** (BPS, 2024). Artinya, rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Padang telah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA kelas 2, namun belum menamatkan pendidikan menengah atas secara penuh. **Perbedaan durasi sekolah antara laki-laki dan perempuan tergolong tidak signifikan, menunjukkan kesetaraan relatif dalam akses pendidikan.**



Gambar 12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang Tahun 2024

RLS penduduk Kota Padang **masih berada di bawah 12 tahun** menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk **belum memiliki peluang mencapai jenjang pendidikan tinggi**. Untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, seseorang umumnya harus menyelesaikan pendidikan menengah atas terlebih dahulu, yaitu selama 12 tahun pendidikan formal.

GURU HONORER

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar. Lebih lanjut, dalam UU No. 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Di Indonesia, belum semua guru berstatus Aparatur Sipil negara (ASN), masih banyak guru berstatus sebagai guru honorer. Dimana guru tersebut bekerja di sekolah tanpa status tetap dari pemerintah pusat. Sistem penggajian guru honorer juga bukan dari pemerintah pusat seperti ASN.

Kota Padang memiliki **3.858 guru honorer di tahun 2024**, yang tersebar di tingkat TK hingga SMP/MTs. **Sebagian besar guru honorer tersebut adalah perempuan, pada tingkat TK/PAUD.**

Tabel 7. Sebaran Guru Honorer Kota Padang tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TK / PAUD	17	1426	1443
2	SD / MI	331	1262	1593
3	SMP / MTs	212	610	822
Total		560	3298	3858

ANAK MEMANFAATKAN PUSTAKA

Pustaka merupakan salah satu sarana belajar yang dapat dimanfaatkan oleh anak. Keberadaan perpustakaan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Perpustakaan dapat memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dikarenakan tidak semua informasi ataupun pengetahuan dapat diraih saat pembelajaran di kelas, sehingga perpustakaan menjadi alternatif sumber belajar untuk menunjang proses pembelajaran.

Keberadaan perpustakaan sebagai salah satu fasilitas sekolah juga diatur langsung dalam beberapa Undang-undang, hal ini menggambarkan keberadaan perpustakaan penting untuk menunjang pembelajaran. Namun pada prakteknya masih terdapat sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Untuk itu pemerintah kota padang menyediakan perpustakaan daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tabel 8. Daftar Anak yang Datang Memanfaatkan Pustaka
Kota Padang Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Pengunjung		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5 - 9 Tahun	10550	9101	19651
2	10 - 14 Tahun	2935	2689	5624
3	15 - 19 Tahun	1559	1521	3080
Total		15.044	13.311	28.355

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kota Padang, 2024

Dari daftar **kunjungan ke Perpustakaan di Kota Padang**, terlihat bahwa **pengunjung terbanyak adalah laki-laki** pada kelompok umur **5-9 tahun**. Total kunjungan di tahun 2024 adalah sebanyak **28.355 kunjungan**.

Selain perpustakaan, tempat lain yang dapat bertujuan untuk membantu pengembangan masyarakat di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal dan perpustakaan umum, adalah Taman Bacaan Masyarakat atau dikenal dengan singkatan TBM. Taman ini adalah perpustakaan skala kecil yang dikenal sebagai sudut baca, rumah baca, rumah pintar, dan sebagainya. Berdasarkan petunjuk teknis TBM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TBM adalah lembaga yang mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, berdiskusi, membaca buku, menulis, dan kegiatan serupa.

TAMAN/ RUANG BERMAIN ANAK

Tabel 9. Daftar Taman / Ruang Bermain Anak Kota Padang Tahun 2024

No	Nama Taman	Luas (m3)	Kelurahan	Kecamatan	Koordinat Lokasi	Jenis Fasilitas Bermain Anak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Taman Kapal Malin	558	Batang Arau	Padang Selatan	-0.96684570003 48781,100.3566	Montase Kapal Malin
2	Taman Rimbo	1950	Rimbo Kaluang	Padang Barat	-.926143168345 0254,	Ayunan (Pakai Atap) (2),
3	Padang Skatepark	418	Purus		0.927643001468 5499,	Arena Skateboard
4	Taman Tan Malaka	850	Sawahan	Padang Timur	-.945447573964 6192, 100.3655394303 239	Seluncuran (1), Mangkok Putar (1), Jembatan
5	Taman Sawahan Timur	212	Sawahan Timur		-0.94220161931 93692, 100.3707107881 4475	Seluncuran (2), Mangkok Putar (1), Ayunan (1),
6	Taman Jati Gaung	650	Jati		-0.9323279, 100.371032	Seluncuran (1), Mangkok Putar (1)
7	Taman Nanggalo	1500	Surau Gadang	Nanggalo	-0.89628825897 95647,	Ayunan (Pakai Atap) (2),
8	Taman Parupuk	439	Parupuk Tabing	Koto Tangah	-0.876176524147 6156,	Ayunan (Pakai Atap) (1),
9	Taman Gurun Laweh	70	Gurun Laweh Nan XX	Lubuk Begalung	-0.96005730223 58602, 100.3882541484	Seluncuran (1), Ayunan (1)
10	Taman Kuranji	400	Gunung Sarik	Kuranji	-0.90892218167 84298, 100.4020217365	Monkey Bar (1), Seluncuran
11	Taman Pauh	200	Koto Lua	Pauh	-0.93244861356 21557, 100.4589014929	Monkey Bar (1), Jungkat-jungkit (1),

Taman/ Ruang bermain anak merupakan ruang yang dimanfaatkan untuk bermain dan berinteraksi sosial, sehingga menjadi wadah untuk membantu perkembangan fisik dan mental anak.

Perancangan dan pembangunan taman bermain anak memerlukan penekanan dalam aspek keamanan dan kenyamanan untuk memastikan tingkat keselamatannya. Kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas taman bermain juga menjadi penting agar kebutuhan akan taman terpenuhi.

Saat ini, Kota Padang memiliki 11 taman bermain. Jumlah ini bertambah sebanyak 2 taman dari tahun sebelumnya, tahun 2023.

BAB VI

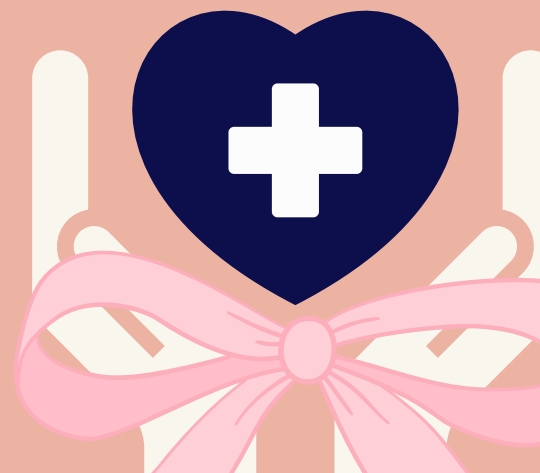
BIDANG KESEHATAN

DAN

KELUARGA BERENCANA

2025

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG





Pelayanan kesehatan merupakan salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan penduduk untuk menunjang kehidupannya. Pelayanan ini haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial jenis kelamin, agama dan lain-lain. Pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjangkau setiap lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

Untuk memastikan penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan dan evaluasi terus menerus terhadap program program yang telah dilaksanakan. Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karena dari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pelayanan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat ataukah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan.

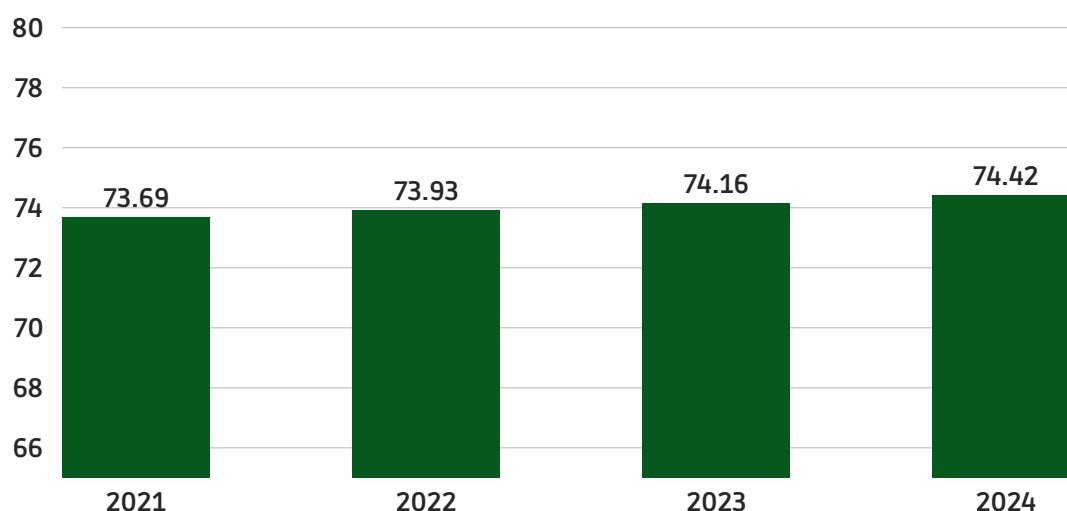
Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (morbidity rate), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis keluhanannya, akses ke pelayanan kesehatan yang meliputi cara berobat, jenis- jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.



UMUR HARAPAN HIDUP

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan taksiran jumlah rata-rata usia dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Semakin tinggi **UHH suatu wilayah, menandakan semakin tinggi pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya**. Di Negara maju, **UHH bisa mencapai 80 tahunan**. Sementara di negara berkembang terbilang lebih rendah, bahkan ada yang berkisar 50 tahunan saja.



Gambar 13. Umur Harapan Hidup di Kota Padang

Berdasarkan data BPS (2024), umur harapan hidup penduduk Kota Padang **terus meningkat setiap tahun**. Bayi yang **lahir pada tahun 2024** diperkirakan memiliki usia harapan hidup **hingga 74 tahun**, dengan **asumsi** kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi tetap stabil. **Jika kondisi** tersebut membaik, angka tersebut diperkirakan akan meningkat lebih lanjut.



PELAYANAN KESEHATAN IBU

1 ANGKA KEMATIAN IBU

Angka kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang dikarenakan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Angka kematian Ibu mencerminkan resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh:

- a. Keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan.
- b. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran.
- c. Tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri.

AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.



Tabel 10. Angka Kematian Ibu berdasarkan Umur di Kota Padang
Tahun 2024

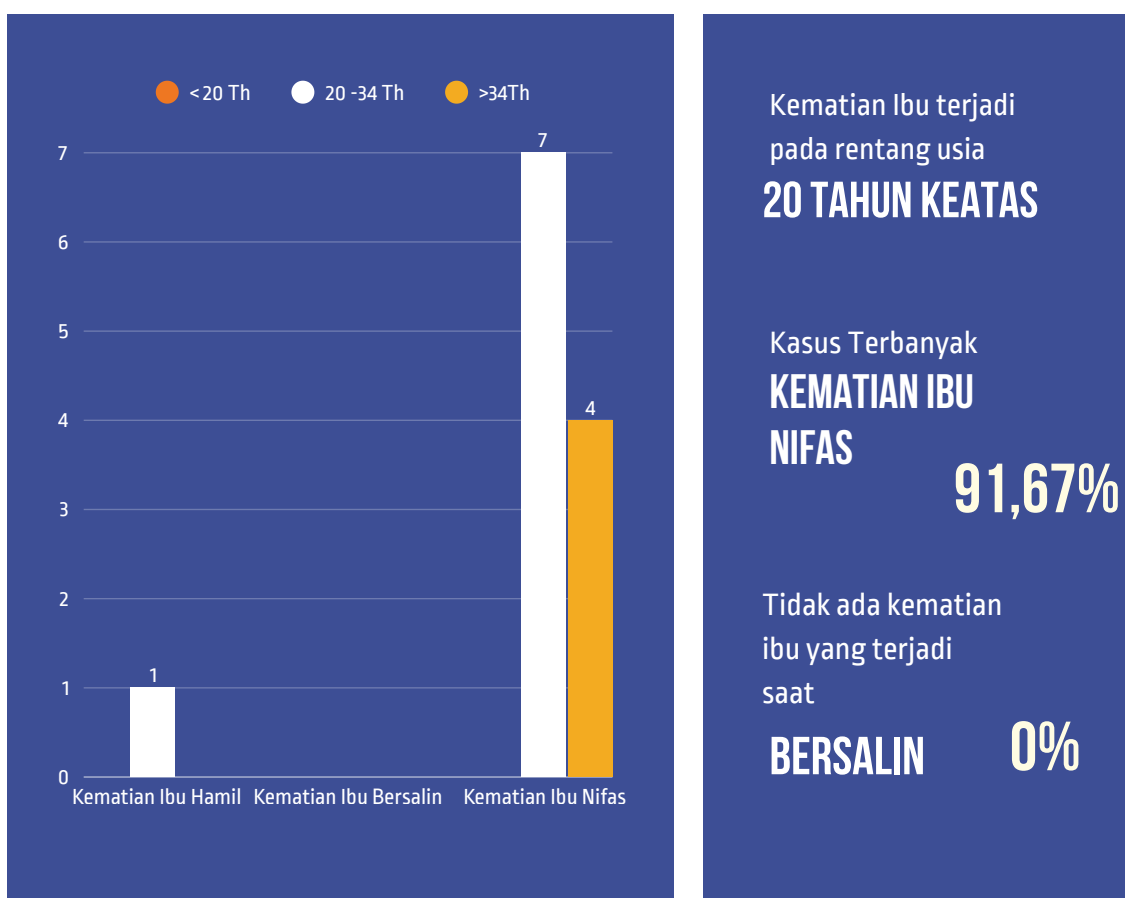
No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu Hamil			Jumlah Kematian Ibu Bersalin			Jumlah Kematian Ibu Nifas		
		< 20 Th	20 -34 Th	> 34 Th	< 20 Th	20 -34 Th	> 34 Th	< 20 Th	20 -34 Th	> 34 Th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bungus Teluk Kabung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lubuk Kilangan	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3	Lubuk Begalung	-	1	-	-	-	-	-	-	2
4	Padang Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Padang Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Padang Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Padang Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nanggalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kuranji	-	-	-	-	-	-	-	4	1
10	Pauh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Koto Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang , 2024



AKI Kota Padang pada tahun 2024 tercatat **sebanyak 12 kasus**, yaitu 1 kasus kematian ibu saat hamil dan 11 kasus kematian ibu saat nifas, dimana 7 kasus terjadi pada kelompok usia 20–34 tahun, dan 4 kasus terjadi pada usia di atas 34 tahun. Sementara, **tidak terdapat kematian ibu saat proses persalinan**.

Dibandingkan tahun sebelumnya, AKI tahun 2024 **mengalami penurunan signifikan**. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang, pada **tahun 2023** jumlah kematian ibu tercatat **sebanyak 23 kasus**.



Gambar 14. Angka Kematian Ibu di Kota Padang



2 PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia. Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa sekitar persalinan, hal ini disebabkan antara lain pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Maka saat persalinan dibutuhkan bantuan tenaga kesehatan.

Tabel 11. Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibu Bersalin / Ibu Nifas	Persalinan ditolong Nakes		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	526	488	92.8	488	92.8
2	Lubuk Kilangan	1093	841	76.9	841	76.9
3	Lubuk Begalung	2337	1885	80.7	1885	80.7
4	Padang Selatan	1184	849	71.7	849	71.7
5	Padang Timur	1528	1410	92.3	1411	92.3
6	Padang Barat	836	483	57.8	483	57.8
7	Padang Utara	1099	895	81.4	895	81.4
8	Nanggalo	1136	873	76.8	873	76.8
9	Kuranji	2787	2342	84	2342	84
10	Pauh	1184	769	64.9	769	64.9
11	Koto Tangah	3758	3104	82.6	3104	82.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Setelah melahirkan, ibu memasuki masa nifas. Pemberian vitamin A dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin A, meningkatkan imunitas, membantu produksi ASI. Sehingga dapat memperkuat kondisi ibu yang baru melahirkan.

Padang Barat tercatat menjadi kecamatan tertinggi yang melakukan proses persalinan **tanpa bantuan tenaga kesehatan dan rendahnya angka pemberian vitamin A saat ibu nifas**. Hal ini dapat menjadi fokus untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan persalinan dibantu tenaga kesehatan dan mengkonsumsi vitamin A saat nifas. **Bantuan Dinas terkait juga dibutuhkan agar angka persalinan dibantu tenaga kesehatan terus meningkat.**

3 PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

Pelayanan antenatal (ANC) pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan (Nakes) dan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pencapaian upaya kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.



Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Tabel 12. Cakupan Pelayanan *Antenatal Care* per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Sasaran	K1		K4	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	530	505	95.3	493	93
2	Lubuk Kilangan	1100	1007	91.5	934	84.9
3	Lubuk Begalung	2352	2055	87.4	1879	79.9
4	Padang Selatan	1193	987	82.7	915	76.7
5	Padang Timur	1538	1450	94.3	1424	92.6
6	Padang Barat	842	626	74.3	545	64.7
7	Padang Utara	1106	1007	91	960	86.8
8	Nanggalo	1144	916	80.1	882	77.1
9	Kuranji	2806	2469	88	2387	85.1
10	Pauh	1192	984	82.6	898	75.3
11	Koto Tengah	3782	3378	89.3	3193	84.4
	Padang	17585	15384	87.5	14510	82.5

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Dari data di atas, **tercatat 87,5 %** ibu hamil di Kota Padang tahun 2024 **telah mendapatkan Pelayanan Antenatal Care pertamanya**. Angka ini **lebih rendah dari tahun sebelumnya**, dimana ibu yang mendapatkan antenatal pertama di tahun 2023 sebanyak **91%**. Sementara, ibu yang mendapatkan antenatal care sesuai dengan standar **4 kali ada sebanyak 82,5%**. Jumlah ini **meningkat sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya**.

Tablet tambah darah /tabel zat besi (Fe) untuk ibu Hamil

Tabel 13. Cakupan Tablet Fe pada Bumil Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Ibu hamil	Fe 3 (90 tablet)	
			Jumlah yang mendapatkan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	530	505	95.3
2	Lubuk Kilangan	1100	937	85.2
3	Lubuk Begalung	2352	1923	81.8
4	Padang Selatan	1193	932	78.1
5	Padang Timur	1538	1424	92.6
6	Padang Barat	842	587	69.7
7	Padang Utara	1106	954	86.3
8	Nanggalo	1144	893	78.1
9	Kuranji	2806	2341	83.4
10	Pauh	1192	898	75.3
11	Koto Tangah	3782	3064	81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024

Pemberian zat besi pada ibu hamil ini bertujuan untuk menurunkan kejadian anemia pada ibu hamil yang kadang menjadi penyebab perdarahan saat persalinan ibu hamil tersebut dan berujung pada kematian ibu bersalin. Ibu hamil harus mendapatkan minimal 90 tablet tambah darah untuk mencapai indikator Fe3.

Secara umum, minimal **3 dari 4 Ibu hamil di Kota Padang sudah mengonsumsi tablet Fe3 di tahun 2024**. Di beberapa Kecamatan seperti Bungus Teluk Kabung dan Padang Timur, sudah **lebih dari 90% ibu** hamilnya mengonsumsi tablet Fe3.

Selain pemberian tablet Fe, pemberian imunisasi juga penting dilakukan. **Imunisasi Td (Tetanus dan Difteri)** merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi ibu hamil dan wanita subur dari tetanus dan difteri. Imunisasi Td yang diberikan kepada wanita usia subur (WUS) atau ibu hamil mencakup 5 dosis yang dinamakan Td1, Td2, Td3, Td4, dan Td5. **Jika seorang ibu telah mendapatkan minimal dua dosis Td atau lebih, maka ibu tersebut telah mendapatkan imunisasi Td2+.**

Pada tahun 2024, tercatat bahwa semua ibu hamil di kecamatan Bungus Teluk Kabung telah mendapatkan imunisasi Td2+. Sementara itu, kecamatan dengan cakupan imunisasi Td2+ paling rendah di Kota Padang adalah Kecamatan Padang Barat, dengan **hanya 54% ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td2+.**

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ibu hamil yang telah memiliki **imunisasi Td2+ meningkat**. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang (2024), tercatat bahwa **pada tahun 2023**, ada sebanyak **72,6% ibu hamil** di Kota Padang telah memiliki imunisasi Td2+, dan **meningkat menjadi 80,06% pada tahun 2024.**



Tabel 14. Cakupan Imunisasi Td 2+ berdasarkan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Bumil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil	
			Td2+	
			Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	530	621	117, 2
2	Lubuk Kilangan	1100	865	78, 6
3	Lubuk Begalung	2352	1923	81, 8
4	Padang Selatan	1193	861	72, 2
5	Padang Timur	1538	1444	93, 9
6	Padang Barat	842	456	54, 2
7	Padang Utara	1106	994	89, 9
8	Nanggalo	1144	905	79, 1
9	Kuranji	2806	2347	83, 6
10	Pauh	1192	715	60, 0
11	Koto Tengah	3782	3125	82, 6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Kecamatan Bungus Teluk Kabung tercatat memiliki **persentase imunisasi Td2+ tertinggi**, meskipun ibu hamil di wilayah ini hanya **mendapatkan dosis Td5** tanpa riwayat imunisasi dosis sebelumnya, seperti Td1 hingga Td4.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (2024), jumlah ibu hamil yang **menerima imunisasi Td1 terbanyak** terdapat di Kecamatan **Padang Barat** (23%) dan **Pauh** (20%). Sementara itu, di sebagian besar kecamatan lainnya, proporsi ibu hamil yang mendapatkan **dosis Td1 masih di bawah 10%**. Bahkan, di beberapa kecamatan seperti **Bungus Teluk Kabung, Padang Utara, Padang Timur, dan Padang Selatan, tidak ada ibu hamil yang menerima imunisasi Td1**. Kondisi serupa juga terjadi pada dosis imunisasi Td lainnya, yang secara umum masih rendah cakupannya di kalangan ibu hamil.



Gambar 15. Cakupan Imunisasi Td di Kota Padang tahun 2024



PELAYANAN KESEHATAN ANAK

1 ANGKA KEMATIAN BAYI DAN BALITA

Tabel 15. Jumlah Kematian Bayi dan Balita Kota padang tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi			Jumlah kematian Balita		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bungus Teluk Kabung	6	5	11	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	3	4	7	1	0	1
3	Lubuk Begalung	11	6	17	0	2	2
4	Padang Selatan	6	7	13	1	2	3
5	Padang Timur	2	0	2	0	1	1
6	Padang Barat	1	5	6	0	0	0
7	Padang Utara	4	3	7	0	0	0
8	Nanggalo	4	3	7	0	1	1
9	Kuranji	6	10	16	1	4	5
10	Pauh	4	4	8	0	1	1
11	Koto Tengah	16	6	22	2	3	5
Total		63	53	116	5	14	19

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau *infant mortality rate* (IMR) merupakan salah satu indikator sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat dan digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah **kematian bayi** di Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebanyak **116 kematian**, dan jumlah **kematian balita** adalah **sebanyak 19 kematian**. **Angka ini menurun dari tahun sebelumnya**, dimana pada **tahun 2023, Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 120 kematian bayi dan 137 kematian balita**. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang **sudah berhasil menekan angka kematian bayi dan balita** di Kota Padang.

2 CAKUPAN BAYI BARU LAHIR RENDAH

Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) **didefinisikan** sebagai bayi lahir yang **berat badan kurang dari 2500 gram**. Bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak, cenderung mempunyai pertumbuhan fisik yang terhambat. Selain itu, bayi BBLR mudah terkena infeksi.

Pada tahun 2024, kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yang **mendapatkan pelayanan kesehatan** di Kota Padang tercatat sebesar **3,3% dari total bayi lahir hidup**. Angka ini **menunjukkan penurunan** dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu **3,5% pada 2023**.



Tabel 16. Cakupan Bayi BBLR yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah lahir hidup			BBLR					
		L	P	Total	L	%	P	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bungus Teluk Kabung	271	219	490	4	1.5	2	0.9	6	1.2
2	Lubuk Kilangan	433	409	842	13	3	30	7.3	43	5.1
3	Lubuk Begalung	950	940	1890	32	3.4	46	4.9	78	4.1
4	Padang Selatan	427	425	852	12	2.8	22	5.2	34	4
5	Padang Timur	716	697	1413	26	3.6	14	2	40	2.8
6	Padang Barat	251	237	488	10	4	11	4.6	21	4.3
7	Padang Utara	457	439	896	5	1.1	8	1.8	13	1.5
8	Nanggalo	432	443	875	11	2.5	5	1.1	16	1.8
9	Kuranji	1215	1128	2343	46	3.8	26	2.3	72	3.1
10	Pauh	378	388	766	23	6.1	21	5.4	44	5.7
11	Koto Tengah	1520	1589	3109	49	3.2	51	3.2	100	3.2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024

Koto Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah **kelahiran bayi hidup terbanyak** di Kota Padang pada tahun 2024. Sementara itu, **Kecamatan Bungus Teluk Kabung** mencatat kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) **terendah**, yaitu 1,2% dari 490 kelahiran hidup, atau **sekitar 1 dari setiap 82 kelahiran**. Di sisi lain, kecamatan dengan **persentase BBLR tertinggi adalah Pauh**, dengan estimasi 1 kasus BBLR dari setiap 17 kelahiran hidup



3 CAKUPAN IMUNISASI PADA BAYI 0-11 BULAN

Pemerintah Kota Padang menjalankan program imunisasi untuk bayi guna mencegah dan melindungi mereka dari berbagai penyakit.

Tabel 17. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Sasaran			Jumlah bayi mendapatkan imunisasi lengkap					
		L	P	Total	L	%	P	%	Total	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bungus Teluk Kabung	251	235	486	238	94.8	224	95.3	462	95.1
2	Lubuk Kilangan	515	503	1018	461	89.5	461	91.7	922	90.6
3	Lubuk Begalung	1101	1077	2178	972	88.3	948	88	1920	88.2
4	Padang Selatan	567	522	1089	488	86.1	468	89.7	956	87.8
5	Padang Timur	720	698	1418	690	95.8	657	94.1	1347	95
6	Padang Barat	390	387	777	264	67.7	275	71.1	539	69.4
7	Padang Utara	526	481	1007	465	88.4	471	97.9	936	92.9
8	Nanggalo	533	516	1049	446	83.7	419	81.2	865	82.5
9	Kuranji	1321	1273	2594	1152	87.2	1204	94.6	2356	90.8
10	Pauh	561	543	1104	443	79	441	81.2	884	80.1
11	Koto Tengah	1783	1707	3490	1432	80.3	1460	85.5	2892	82.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Program imunisasi ini dilakukan oleh petugas puskesmas, tidak hanya menunggu di puskesmas akan tetapi mencari dan melaksanakan imunisasi di luar puskesmas seperti posyandu dan pos-pos pelayanan kelurahan lainnya, serta dengan pengembangan program pada bidan-bidan praktek swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh terhadap masyarakat.

Bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Kota Padang tahun 2024 adalah **sebanyak 86,8% dari total bayi**. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 71%. Dari 11 kecamatan di Kota Padang, **lebih dari 80% bayi di tiap kecamatan sudah mendapatkan imunisasi lengkap**.

Padang Barat menjadi kecamatan dengan persentase imunisasi lengkap **terendah di tahun 2024, yaitu sebanyak 69,4 %** telah diberi imunisasi lengkap. Namun **persentase tersebut** meningkat signifikan **dibandingkan dengan kondisi di tahun 2023**. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Padang, pada tahun 2023 tercatat 40% bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Kecamatan Padang Barat. **Artinya terjadi peningkatan jumlah bayi imunisasi lengkap di Kecamatan padang Barat sebesar 29,4% pada tahun 2024**



Gambar 16. Persentase bayi imunisasi lengkap Kota Padang 2023 dan 2024



4 STATUS GIZI BALITA

Status gizi balita dapat dilihat berdasarkan indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Balita dengan kategori pendek dan sangat pendek merupakan balita yang mengalami stunting. Menurut Badan Pusat Statistika, Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Stunting berdampak pada gangguan kognitif dan risiko menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Target nasional balita stunting adalah kurang dari 20%. Stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan pola asuh yang salah, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan ibu atau pengasuh tentang PMBA. Penyakit infeksi berulang juga menyebabkan stunting pada balita. Oleh sebab itu, peningkatan upaya-upaya pencegahan perlu dilakukan, seperti penanganan gizi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan baduta.

Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan antara lain konseling gizi untuk calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui, kelas ibu di setiap puskesmas, sosialisasi dan praktik PMBA di wilayah, optimalisasi kegiatan KP-Ibu, dan optimalisasi kader yang sudah dilatih PMBA (di meja 4 posyandu).



Tabel 18. Status Gizi Balita Berdasarkan Kecamatan Kota Padang tahun 2024

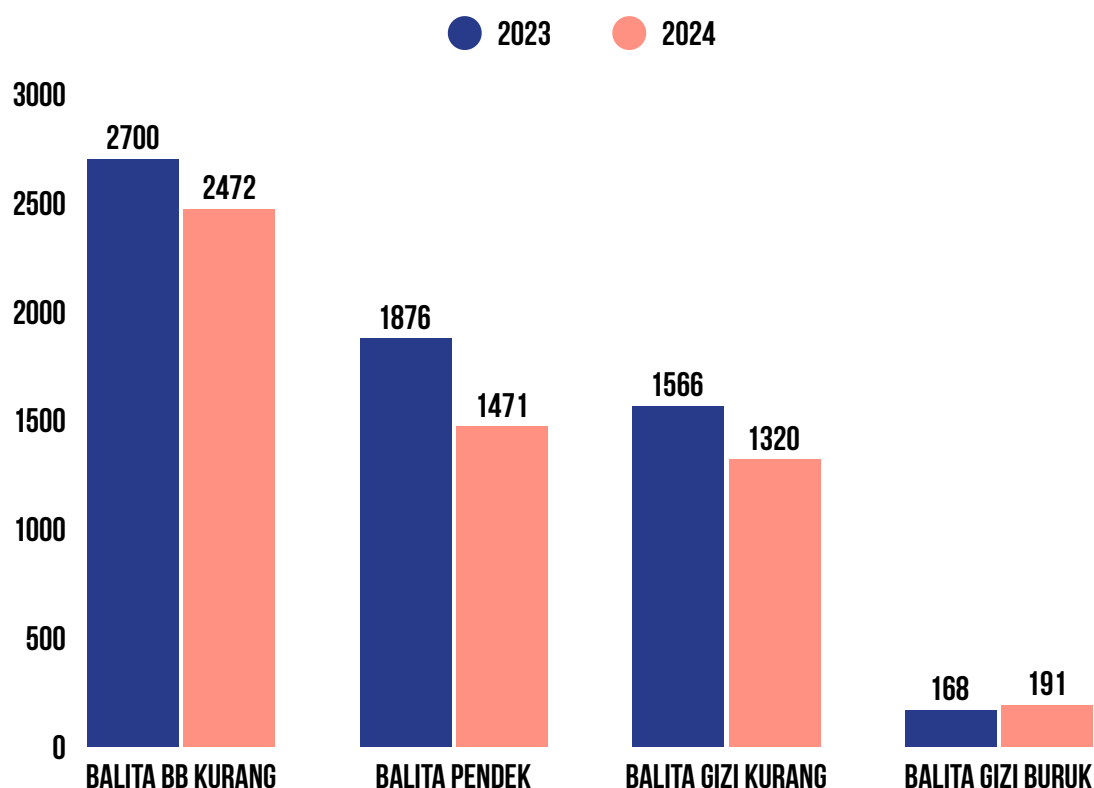
No	Kecamatan	Jumlah Balita BB kurang (BB/U)	Jumlah Balita Pendek (TB/U)	Jumlah Balita Gizi kurang (BB/TB -3 SD sampai -2 SD)	Jumlah Balita gizi buruk (BB/TB <-3 SD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bungus Teluk Kabung	41	38	30	0
2	Lubuk Kilangan	76	46	72	3
3	Lubuk Begalung	289	106	172	5
4	Padang Selatan	268	137	167	6
5	Padang Timur	250	117	119	13
6	Padang Barat	109	67	73	8
7	Padang Utara	101	67	38	17
8	Nanggalo	95	47	44	6
9	Kuranji	248	132	140	59
10	Pauh	258	148	166	9
11	Koto Tengah	737	566	299	65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024

Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran **58.103 balita** Kota Padang Pada tahun 2024, terlihat bahwa Kecamatan **Koto Tengah** memiliki **kasus gizi lebih lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain**. Kecamatan ini memiliki angka balita BB kurang, Balita Pendek, Balita Kurang gizi dan Balita gizi buruk yang tinggi.



Jika dibandingkan dengan **kasus tahun sebelumnya**, angka balita gizi buruk **meningkat**, sementara **kasus lainnya menunjukkan penurunan**. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah guna menekan angka Balita Gizi Buruk tersebut



Gambar 17. Status Gizi Balita Kota Padang Tahun 2023 dan 2024

PENDERITA HIV/ AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan penyakit menular yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Pada tahun 2024, Kota Padang **mencatat 311 kasus HIV/AIDS**, dimana **86,17% diantaranya adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan**.



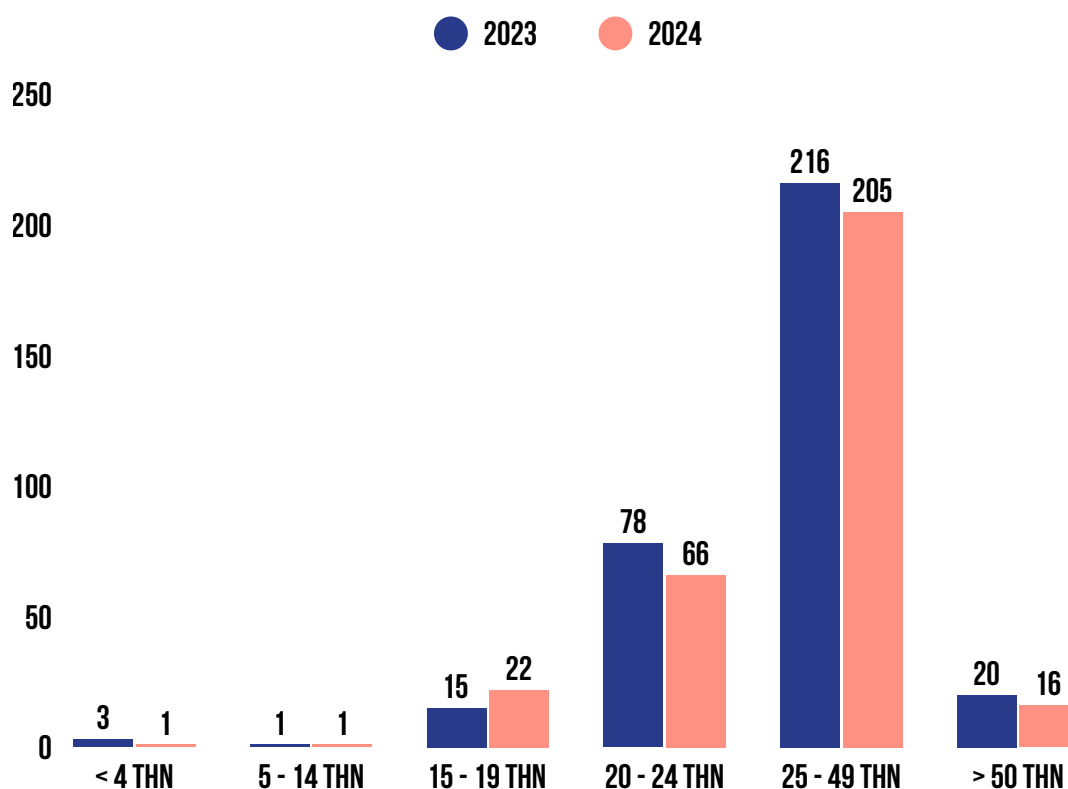
Tabel 19. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kota Padang Tahun 2024

No	Kelompok Umur	HIV		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 4 Thn	0	1	1
2	5 - 14 Thn	1	0	1
3	15 - 19 Thn	21	1	22
4	20 - 24 Thn	61	5	66
5	25 - 49 Thn	172	33	205
6	> 50 Thn	13	3	16
Total		268	43	311

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024

Jumlah orang dengan HIV tertinggi berada pada kelompok usia 25-49 tahun, baik pada laki-laki maupun perempuan. Sementara kelompok usia termuda dengan HIV adalah usia kurang dari 4 tahun.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kasus HIV/AIDS telah berkurang. Menurut data Dinas Kesehatan (2023), terdapat sebanyak 333 Kasus HIV, dengan distribusi kelompok usia tertinggi sama, yaitu kelompok usia 25-49 tahun dengan total kasus 216. Sementara kelompok usia termuda juga sama, yaitu pada kelompok usia kurang dari 4 tahun, sebanyak 3 kasus



Gambar 18. Sebaran kasus H IV menurut Kelompok Usia di Kota Padang Tahun 2023 dan 2024

POSYANDU

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) adalah sebuah layanan kesehatan yang berbasis masyarakat di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita. Posyandu biasanya dikelola oleh kader-kader sukarela yang mendapatkan pelatihan dasar kesehatan, dan mendapat dukungan dari Puskesmas.

Posyandu diklasifikasikan menjadi 4 strata, yaitu posyandu pratama, madya, Purnama, dan Mandiri. Perbedaan keempat posyandu ini ada pada jumlah kader, dan program yang dimiliki.



Tujuan utama Posyandu adalah untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, Posyandu juga berperan dalam mendukung program pemerintah dalam kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pemberantasan penyakit menular.

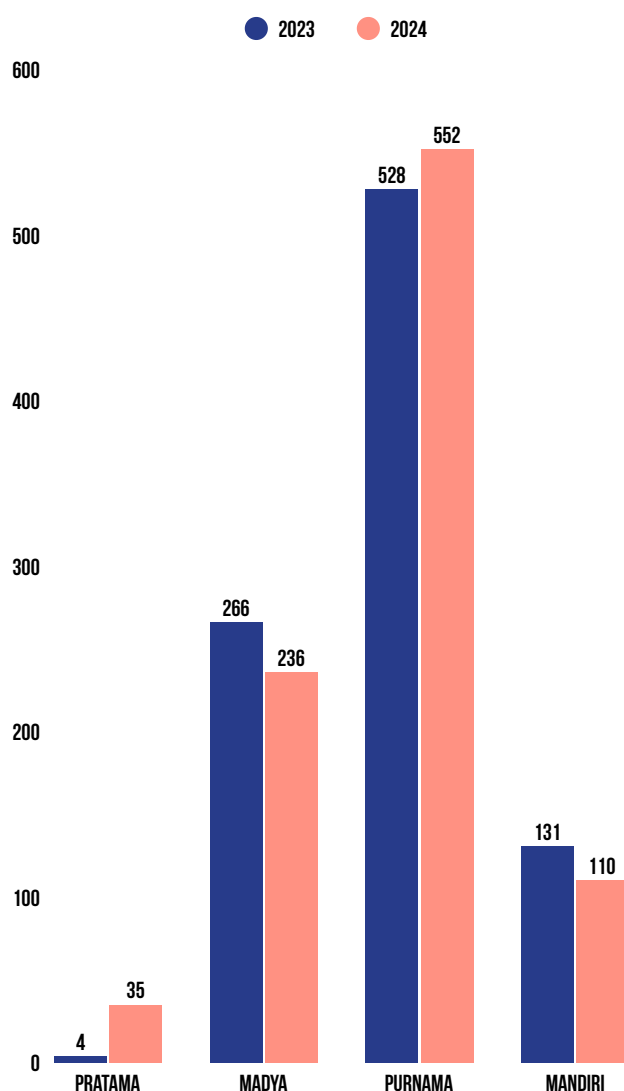
Tabel 20. Jumlah Posyandu menurut Strata Posyandu Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Strata Posyandu				Jumlah	Posyandu yang melakukan pelayanan	
		Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	40	0	40	40	100
2	Lubuk Kilangan	0	45	0	0	45	45	100
3	Lubuk Begalung	0	53	48	15	116	116	100
4	Padang Selatan	3	12	64	9	88	88	100
5	Padang Timur	0	41	36	9	86	86	100
6	Padang Barat	0	3	62	0	65	65	100
7	Padang Utara	0	21	51	13	85	85	100
8	Nanggalo	0	16	30	16	62	62	100
9	Kuranji	5	0	75	15	95	95	100
10	Pauh	0	0	54	19	73	73	100
11	Koto Tangah	27	45	92	14	178	178	100
Total		35	236	552	110	933	933	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2024



Kota Padang tercatat **memiliki 933 posyandu aktif di tahun 2024**. **Posyandu Purnama** menjadi **strata tertinggi yang aktif**, yaitu **sebanyak 552 posyandu**. Sementara **posyandu mandiri** sudah tersedia sebanyak **110 posyandu**. Kecamatan **Lubuk Kilangan dan Bungus Teluk Kabung** menjadi dua kecamatan yang **hanya memiliki satu jenis posyandu**. Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki 45 posyandu madya dan Bungus Teluk Kabung memiliki 40 posyandu Purnama. Jumlah posyandu di kedua kecamatan ini masih sama dengan kondisi pada tahun sebelumnya.



GAMBAR 19. JUMLAH POSYANDU KOTA PADANG DARI TAHUN 2023 KE 2024

4 Posyandu **bertambah** di tahun 2024

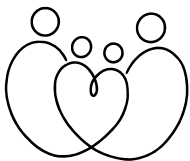
31 Posyandu Pratama **bertambah** di kecamatan **Kuranji, Koto Tengah dan Padang Selatan**

30 Posyandu Madya **naik strata**.
Di beberapa kecamatan terjadi perubahan dari posyandu madya ke **posyandu purnama**

21 Posyandu Mandiri tidak **beroperasi** di tahun **2024** karena **berbagai faktor**, baik karena sarana prasarana ataupun kurangnya kader posyandu.



KELUARGA BERENCANA



Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program utama dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). KB merupakan salah satu program nasional untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu menggunakan alat kontrasepsi buatan manusia dan kontrasepsi alami

Tabel 21. Jumlah Peserta KB Baru (PB) Perkecamatan Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Peserta KB Baru						Total
		IUD	MOW	Implant	Suntik	MOP	Kondom	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Padang Selatan	193	14	246	886	0	395	1,734
2	Padang Timur	378	442	82	471	0	423	1,796
3	Padang Barat	434	6	452	459	0	44	1,395
4	Padang Utara	385	0	402	889	0	216	1,892
5	Bungus Teluk Kabung	5	0	146	258	0	207	616
6	Lubuk Begalung	212	24	397	1,788	1	1,030	3,451
7	Lubuk Kilangan	82	7	161	1,254	0	419	1,923
8	Pauh	87	15	150	910	0	380	1,542
9	Kuranji	177	49	128	3,020	0	1,222	4,596
10	Nanggalo	50	2	26	873	0	419	1,370
11	Koto Tangah	135	11	131	3,381	3	343	4,001
Jumlah		2,138	570	2,321	14,189	4	5,098	24,320

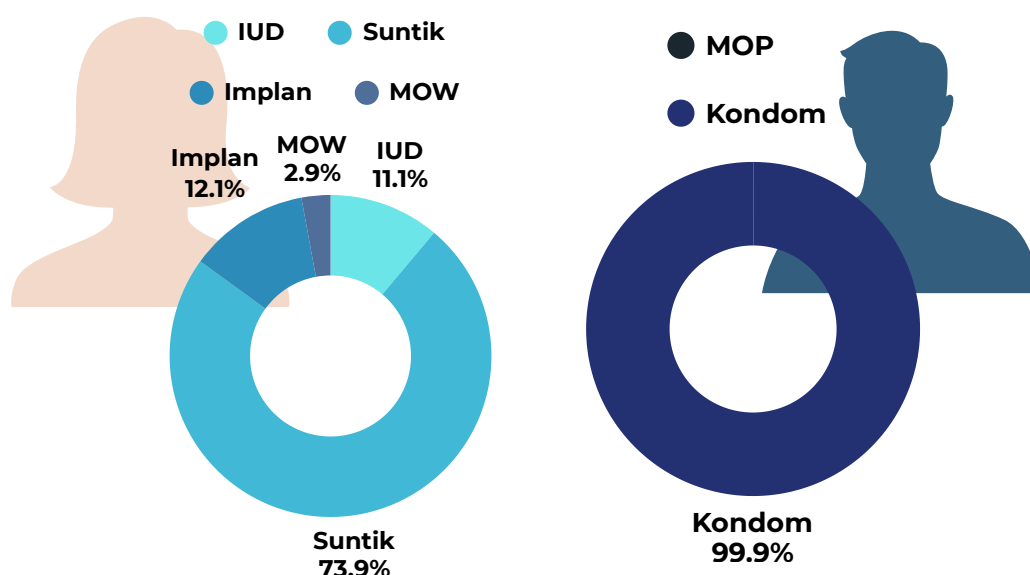
Sumber :Dinas P3AP2KB Kota Padang, 2024



Program KB yang dilakukan oleh **pria** adalah **MOP dan penggunaan kondom**. Sementara Program KB yang dilakukan oleh **wanita** adalah pelayanan **IUD, MOW, implan dan suntik**.

Berdasarkan data dari DP3AP2KB Kota Padang Tahun 2024, metode kontrasepsi **terbanyak** yang dipilih oleh pasangan usia subur (PUS) adalah **KB suntik**, dengan **total 14.189 perempuan** sebagai akseptor. Sementara itu, jenis **KB yang paling sedikit** digunakan adalah jenis KB Metode Operasi Pria (MOP), yaitu pelayanan kontrasepsi permanen melalui tindakan vasektomi.

Berikut disajikan sebaran penggunaan jenis KB berdasarkan jenis kelamin di Kota Padang tahun 2024.



Gambar 20. Sebaran Program KB berdasarkan Gender di Kota Padang

Pada tahun 2024, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh perempuan adalah KB suntik, sementara yang paling sedikit digunakan adalah Metode Operasi Wanita (MOW). Sementara itu, metode kontrasepsi yang paling umum digunakan oleh laki-laki adalah dengan kondom, yaitu sebanyak 99,9 % dari total KB pria.



Selain KB, program lain dari BKKBN adalah **Bina Keluarga Balita (BKB), yaitu** sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah kader yang berada di tingkat RW. Disamping itu, untuk pembentukan keluarga yang berkualitas juga terdapat **kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).**

Tabel 22. Jumlah BKB dan BKR di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bungus Teluk Kabung	6	6
2	Lubuk Kilangan	8	2
3	Lubuk Begalung	16	7
4	Padang Selatan	12	3
5	Padang Timur	11	4
6	Padang Barat	10	2
7	Padang Utara	10	1
8	Nanggalo	6	3
9	Kuranji	13	3
10	Pauh	10	2
11	Koto Tengah	13	2
Kota Padang		115	35

Sumber :Dinas P3AP2KB kta padang, 2024



BKR merupakan wadah yang tepat untuk membimbing dan membina serta memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Kota Padang memiliki **115 BKB dan 35 BKR di tahun 2024** yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan **Lubuk Begalung menjadi kecamatan yang memiliki BKB dan BKR terbanyak di Kota Padang**. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, Pada tahun 2024 ini terjadi **penambahan satu BKB di Padang Utara dan satu BKR di lubuk kilangan**

Peningkatan tidak hanya terjadi pada BKB dan BKR, namun juga pada jumlah **kelompok kerja KKBPK**. Dimana pada tahun 2023, jumlah kelompok kerjanya adalah **1326**. Sementara, pada tahun 2024 meningkat menjadi **1352 kelompok kerja KKBPK**, dengan kelompok terbanyak adalah sub PPKBD.

Tabel 23. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif di Kota Padang Tahun 2024

No	Nama Kelompok	Jumlah	No	Nama Kelompok	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Koalisi Kependudukan	0	6	BKR	35
2	PKB	24	7	BKL	43
3	PPKBD	183	8	PIK R	55
4	Sub PPKBD	726	9	UPPKA	67
5	BKB	115	10	Pokja Kampung KB	104

Sumber :Dinas P3AP2KB Kotata Padang, 2024



BAB VII

EKONOMI DAN

KETENAGAKERJAAN

2025

PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG

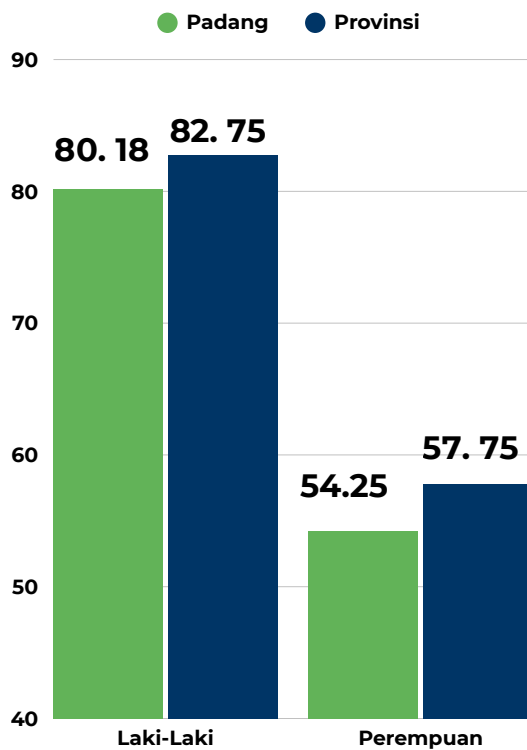


Isu gender dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan sangat kompleks dan berakar dari struktur sosial, budaya, dan ekonomi yang telah lama ada. Meski ada kemajuan, ketimpangan gender masih menjadi masalah signifikan di berbagai negara, mempengaruhi perempuan dalam hal upah, partisipasi kerja, dan akses terhadap kepemimpinan. Upaya untuk mengatasi isu ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk kebijakan pemerintah yang pro-gender, perubahan sosial yang menghapus stereotip, serta pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor ekonomi.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tetapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. **Secara umum** penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan.

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Angkatan kerja merupakan istilah yang mengacu pada penduduk usia kerja, yaitu yang berusia 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Sementara persentase penduduk usia kerja yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan disebut dengan **tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)**. Salah satu indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan adalah TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).



Gambar 21. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan data BPS (2024), **TPAK laki-laki di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah 82,75%**, dan **perempuan sebanyak 57,75%**. Persentase **TPAK Provinsi ini lebih tinggi dari TPAK Kota Padang**.

TPAK laki-laki di Kota Padang tahun 2024 adalah sebesar **80,18%**, Artinya, dari setiap 100 orang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 80 orang bekerja atau sedang mencari kerja, sementara 20 orang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti pelajar, atau pensiun

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk laki-laki usia kerja aktif dalam perekonomian Kota Padang. Sementara itu, **TPAK untuk perempuan adalah 54,25%**, yang mengindikasikan hampir **setengah penduduk perempuan di Kota Padang tidak terlibat aktif dalam perekonomian, karena tidak termasuk angkatan kerja**

Perbedaan TPAK Laki-laki dan perempuan **terlihat sangat mencolok**, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam perekonomian di Kota Padang

Namun demikian, **TPAK untuk perempuan** mengalami **peningkatan dari tahun sebelumnya**, dimana TPAK pada tahun sebelumnya adalah 53,67%. **Berdasarkan penjabaran tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan kontribusi perempuan di Kota Padang meningkat perlahan untuk bidang ekonomi.**

KOPERASI KOTA PADANG

Tabel 24. Koperasi di Kota Padang tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bungus Teluk Kabung	30	1.675
2	Lubuk Kilangan	48	8.67
3	Lubuk Begalung	58	7.008
4	Padang Selatan	62	8.241
5	Padang Timur	102	19.127
6	Padang Barat	127	22.591
7	Padang Utara	96	15.479
8	Nanggalo	33	2.466
9	Kuranji	67	11.078
10	Pauh	52	8.992
11	Koto Tengah	110	11.563
Total		785	116.89

Sumber: Dinas Koperasi, 2024

Koperasi merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi terdiri dari beberapa jenis tergantung kepada tujuan koperasi atau latar belakang koperasi, misalnya koperasi Pegawai Negeri Sipil, Koperasi simpan Pinjam dan lain-lain.

Pada tahun 2024, Kota Padang memiliki 785 koperasi dengan 116890 peserta, dengan Kecamatan Padang Barat sebagai kecamatan dengan jumlah koperasi dan anggota terbanyak saat ini

KIPRAH PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH



Padang merupakan kota yang sangat potensial untuk pertumbuhan industri, baik industri kecil maupun menengah. Hal ini didukung dengan adanya sumber daya yang melimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Tabel 25. Jenis Usaha Mikro dan Data Jumlah Tenaga Kerja pada UMK Kota Padang tahun 2024

No	Kecamat an	Jenis Usaha	MIKRO 2024		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bungus Teluk Kabung	1. Kuliner	619	1018	1637
		2. Industri Makanan Ringan	144	526	670
		3. Industri Kerajinan Tangan	4	15	19
		4. Dagang	229	549	778
		5. Jasa	152	526	678
Total			1148	2634	3782

No	Kecamatan	Jenis Usaha	MIKRO 2024		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2	Koto Tengah	1. Kuliner	994	1674	2668
		2. Industri Makanan Ringan	250	1280	1530
		3. Industri Kerajinan Tangan	50	412	462
		4. Dagang	460	1863	2323
		5. Jasa	432	1128	1560
Total			2186	6357	8543
3	Kuranji	1. Kuliner	972	1809	2781
		2. Industri Makanan Ringan	256	1321	1577
		3. Industri Kerajinan Tangan	141	294	435
		4. Dagang	924	2003	2927
		5. Jasa	592	1098	1690
Total			2885	6525	9410
4	Lubuk Begalung	1. Kuliner	412	1256	1668
		2. Industri Makanan Ringan	254	857	1111
		3. Industri Kerajinan Tangan	52	210	262
		4. Dagang	456	2245	2701
		5. Jasa	260	486	746
		6. Pertanian	1434	5054	6488
		7. Peternakan	1434	5054	6488
Total			4302	15162	19464

No	Kecamatan	Jenis Usaha	MIKRO 2024		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5	Lubuk Kilangan	1. Kuliner	285	652	937
		2. Industri Makanan Ringan	19	295	314
		3. Industri Kerajinan Tangan	35	120	155
		4. Dagang	345	742	1087
		5. Jasa	92	395	487
Total			776	2204	2980
6	Nanggalo	1. Kuliner	351	535	886
		2. Industri Makanan Ringan	115	413	528
		3. Industri Kerajinan Tangan	24	55	79
		4. Dagang	258	642	900
		5. Jasa	285	415	700
Total			1033	2060	3093
7	Padang Barat	1. Kuliner	1202	1512	2714
		2. Industri Makanan Ringan	316	419	735
		3. Industri Kerajinan Tangan	23	34	57
		4. Dagang	1052	1852	2904
		5. Jasa	347	491	838
Total			2940	4308	7248

No	Kecamatan	Jenis Usaha	MIKRO 2024		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
8	Padang Selatan	1. Kuliner	661	1521	2182
		2. Industri Makanan Ringan	173	462	635
		3. Industri Kerajinan Tangan	20	99	119
		4. Dagang	785	1245	2030
		5. Jasa	132	235	367
Total			1771	3562	5333
9	Padang Timur	1. Kuliner	754	1210	1964
		2. Industri Makanan Ringan	132	452	584
		3. Industri Kerajinan Tangan	45	148	193
		4. Dagang	952	1320	2272
		5. Jasa	345	901	1246
Total			2228	4031	6259
10	Padang Utara	1. Kuliner	470	984	1454
		2. Industri Makanan Ringan	60	120	180
		3. Industri Kerajinan Tangan	4	207	211
		4. Dagang	266	1203	1469
		5. Jasa	486	540	1026
Total			1286	3054	4340

No	Kecamatan	Jenis Usaha	MIKRO 2024		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
11	Pauh	1. Kuliner	194	975	1169
		2. Industri Makanan Ringan	61	231	292
		3. Industri Kerajinan Tangan	6	126	132
		4. Dagang	370	1540	1910
		5. Jasa	341	471	812
Total			972	3343	4315

Sumber: Dinas Koperasi Kota Padang, 2024

Kota Padang tercatat memiliki beberapa jenis usaha mikro. **Setiap kecamatan memiliki minimal 5 jenis usaha mikro, yaitu kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, dagang dan jasa.** Terdapat satu kecamatan yang memiliki **7 jenis** usaha mikro, yaitu **Lubuk Begalung**. Selain punya 5 jenis usaha mikro yang telah disebutkan sebelumnya, **kecamatan ini juga memiliki usaha pertanian dan peternakan.**

Usaha Mikro yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Padang telah menyerap banyak tenaga kerja, baik tenaga kerja perempuan maupun laki-laki. Kesempatan perempuan untuk terlibat dalam usaha mikro juga terbuka lebar, hal ini terlihat dari **jumlah pekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja laki-laki di setiap kecamatannya.**

Sama seperti tahun 2023, industri **kerajinan tangan** masih menjadi industri dengan daya serap **tenaga kerja paling kecil**, dan pekerja di dominasi oleh perempuan. Sementara usaha di bidang pertanian dan peternakan baru tercatat di tahun 2024 dan menjadi jenis usaha dengan daya serap tenaga kerja tertinggi, dan didominasi oleh pekerja wanita.

Tabel 26. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Pada UMKM Per Kecamatan di Kota Padang tahun 2024

No	Kecamatan	TAHUN 2024		Total
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	1148	2634	3782
2	Lubuk Kilangan	776	2204	2980
3	Lubuk Begalung	1434	5054	6488
4	Padang Selatan	1771	3562	5333
5	Padang Timur	2228	4031	6259
6	Padang Barat	2940	4308	7248
7	Padang Utara	1286	3054	4340
8	Nanggalo	1033	2060	3093
9	Kuranji	2885	6525	9410
10	Pauh	972	3343	4315
11	Koto Tangah	2186	6357	8543
Total		18659	43132	61791

Sumber: Dinas Koperasi Kota Padang, 2024



Jumlah tenaga kerja yang terserap di UMKM Kota Padang pada tahun 2024 tercatat sebanyak **61.791 orang**. 69,8 % dari pekerja tersebut adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peluang kerja perempuan juga sangat besar di Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga mengambil peran dalam pergerakan ekonomi di Kota Padang.

Pada Tahun 2024, Terdapat 3 jenis pelatihan produktivitas pelaku UMKM yang terlaksana di Kota Padang, dengan total peserta 111 orang dan semua peserta adalah perempuan. Pelatihan ini memberikan peningkatan keterampilan, khususnya pada perempuan, sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Kota Padang. Pelatihan Aspek Pembiayaan menjadi pelatihan yang paling banyak diikuti

Tabel 27. Pelatihan Produktivitas Pelaku UMKM Kota Padang 2024

No	Nama Pelatihan	Bulan	Peserta Perempuan	Peserta Laki-Laki
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Advokasi Hukum	Maret	30	0
2	Pelatihan Akses Pembiayaan	April	44	0
3	Pelatihan Kemasan Dan Logo	May	36	0

Sumber: Dinas Koperasi Kota Padang, 2024

KIPRAH PEREMPUAN DALAM SEKTOR PERIKANAN

Kota Padang memiliki potensi besar di sektor perikanan karena memiliki panjang garis pantai sekitar 84 Km dan berhadapan langsung dengan samudra hindia. Faktor geografis ini dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mendukung perekonomian wilayahnya. Pada tahun 2024, **tercatat ada 146 kelompok nelayan aktif di Kota Padang.**

Tabel 28. Jumlah Kelompok Nelayan Menurut Kecamatan Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Aktif	Pengurus Kelompok			Jumlah Anggota Kelompok		
			L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	24	81	9	90	308	0	320
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	15	58	2	60	269	2	271
4	Padang Selatan	9	23	4	27	91	0	91
5	Padang Timur	0	0	0	0	0	0	0
6	Padang Barat	13	34	5	39	185	0	185
7	Padang Utara	43	98	25	123	347	0	347
8	Nanggalo	4	12	0	12	36	0	36
9	Kuranji	0	0	0	0	0	0	0
10	Pauh	0	0	0	0	0	0	0
11	Koto Tengah	38	123	1	123	320	5	325
Jumlah		146	429	46	474	1556	7	1575

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2024

Terdapat **4 kecamatan yang tidak memiliki kelompok nelayan, yaitu kecamatan Lubuk Kilangan, Padang Timur, Kuranji, dan Pauh**. Posisi kecamatan tersebut yang jauh dari area perairan atau garis pantai membuatnya tidak memiliki peluang menjadi nelayan, seperti di kecamatan lainnya.

Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan maupun anggota kelompok nelayan di Kota Padang **masih sangat rendah**, dan saat ini di dominasi oleh pekerja laki-laki. **Namun, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya**, dimana pada tahun 2023 tidak ada anggota perempuan pada kelompok nelayan di Kota Padang, dan pada tahun 2024, sudah terdapat sebanyak 0,4 % anggota perempuan. **Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mulai berkontribusi di sektor perikanan.**

Hasil dari sektor perikanan dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dijual atau diolah untuk dijual kembali. Kota Padang memiliki kelompok usaha yang berfokus pada pengolahan hasil perikanan. Pada Tahun 2024, **Kota padang memiliki 83 kelompok pengolah hasil perikanan dan semua kelompok tersebut aktif.**

Berbeda dengan pengurus dan anggota kelompok nelayan, **kelompok pengolah hasil perikanan**, baik pengurus maupun anggotanya di **dominasi oleh perempuan**. Hal ini menunjukkan bahwa **perempuan memiliki peran serta di sektor perikanan, khususnya di pengolahan hasil perikanan.**

Koto tangah menjadi kecamatan dengan jumlah kelompok dan anggota pengolahan hasil perikanan **terbanyak**. Sementara itu, **Pauh dan Lubuk Kilangan tidak memiliki kelompok pengolahan hasil perikanan** karena lokasi kedua kecamatan yang tidak berdekatan dengan garis pantai.

Tabel 29. Jumlah Kelompok Pengolah Hasil Perikanan Kota Padang 2024

No	Kecamatan	Aktif	Pengurus Kelompok			Jumlah Anggota Kelompok		
			L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	10	11	32	43	17	57	74
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	1	0	4	4	0	6	6
4	Padang Selatan	2	0	8	8	2	13	15
5	Padang Timur	2	0	8	8	0	12	12
6	Padang Barat	8	14	21	35	67	54	121
7	Padang Utara	14	18	38	56	41	79	120
8	Nanggalo	7	9	19	28	19	30	49
9	Kuranji	2	3	6	9	15	9	24
10	Pauh	0	0	0	0	0	0	0
11	Koto Tangah	37	57	87	144	145	169	314
Jumlah		83	112	223	335	306	429	735

Sumber : Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, 2024

BAB VIII

BIDANG HUKUM DAN

SOSIAL BUDAYA

2025

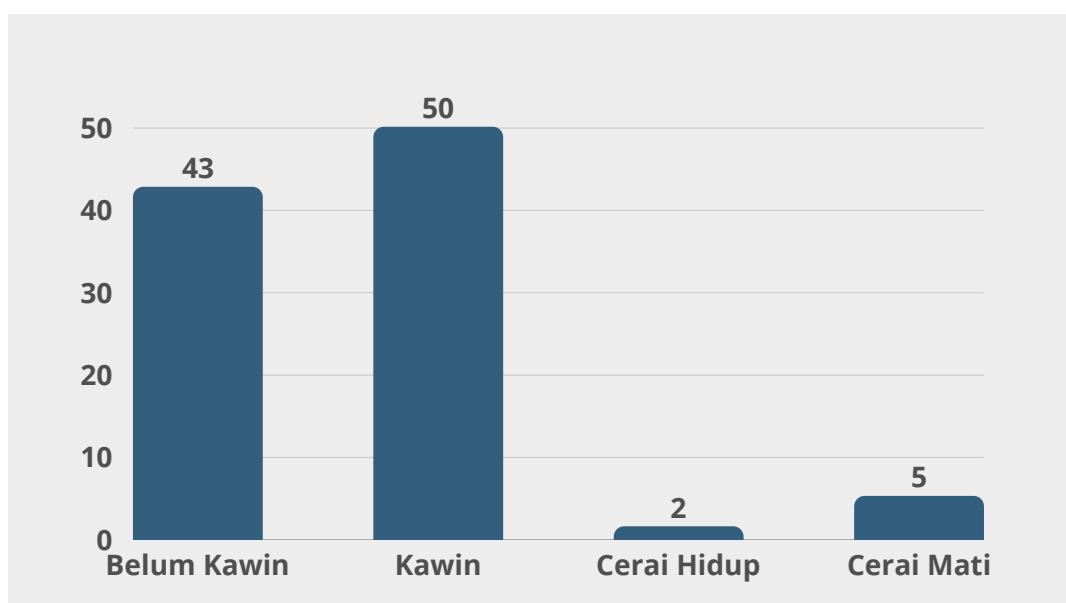
PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG



BIDANG HUKUM

Hukum merupakan sistem yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kelembagaan. Ia berfungsi sebagai perantara utama dalam mengatur hubungan sosial di masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak kriminal melalui hukum pidana. Hukum pidana memiliki peran untuk menuntut pelaku kejahatan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak asasi manusia, membatasi kekuasaan politik, dan menjamin sistem perwakilan yang adil bagi masyarakat. Dalam pandangan hukum, setiap individu harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi, termasuk berdasarkan gender.

Di pengadilan agama, banyak perkara yang berkaitan dengan isu gender, seperti permohonan izin poligami, cerai talak, cerai gugat, itsbat nikah, dan perkara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu hukum keluarga tidak terlepas dari dinamika relasi gender dalam masyarakat.



Gambar 22. Persentase Penduduk berusia 10 tahun menurut Status Perkawinan Di Kota Padang tahun 2024

Berdasarkan data BPS (2024), tercatat bahwa lebih dari setengah penduduk di Kota Padang yang berusia 10 tahun ke atas sudah berstatus menikah, 42,87% penduduk lainnya belum menikah, dan sisanya dalam status bercerai hidup atau cerai mati.

KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
4. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak.

Pada tahun 2024, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) **menangani 60 kejadian yang tersebar kedalam 11 jenis kasus**. Kasus Narkoba menjadi kasus yang terbanyak, yaitu sebanyak 15 kasus, seluruhnya dilakukan oleh laki-laki. Pendampingan BAPAS juga memberikan **pendampingan kepada 3 anak perempuan**, dimana 2 orang terlibat di kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan 1 orang terlibat kasus pengrusakan.



Gambar 23. Sebaran jumlah ABH berdasarkan kasus yang ditangani BAPAS I Kota Padang 2024

Pada tahun 2024, Kota Padang juga mencatat **sebanyak 60 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didampingi LITMAS**. Dari jumlah tersebut, **95% adalah laki-laki** dan sisanya adalah perempuan.

Tabel 30. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan Pendampingan dan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Polresta Padang	33	2	35
2	Koto Tengah	3	0	3
3	Polres Kuranji	2	0	2
4	Polsek Kuranji	2	0	2
5	Polda Sumbar	6	0	6
6	Polres Padang	5	0	5
7	Polsek Padang Barat	1	0	1
8	Polsek Padang Selatan	0	1	1
9	Polsek Padang Timur	2	0	2
11	Polsek Pauh	2	0	2
12	Polsek Bungus Teluk Kabung	1	0	1
Total		57	3	60

Sumber : BAPAS Kota Padang, 2024

Tabel 31. Data Klien yang Telah Selesai Menjalani Pidana di Bapas Kota Padang Berdasarkan Kasus dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kasus	Laki-Laki	Perempuan	Kasus	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Pencurian	119	5	Penggelapan	27	9
Perlindungan Anak	25	1	Pengeroyokan	2	0
Narkotika	588	42	Pembakaran	0	0
Penganiayaan	9	0	Tambang	1	0
Perampokan	6	0	Senjata Tajam	4	0
Lakalantas	3	0	Mata Uang	0	0
Perjudian	7	0	Pembunuhan	6	1
Penadahan	6	1	Pengrusakan	1	0
Pemerasan	5	0	Total	809	59

Sumber : BAPAS Kota Padang, 2024

Data yang disajikan merupakan kasus-kasus **yang telah diproses secara pidana dan didampingi oleh Litmas (Penelitian Kemasyarakatan)**. Laki-laki masih merupakan pelaku terbanyak dalam keseluruhan kasus yang tercatat. Sementara itu, perempuan juga mendapat pendampingan Litmas setelah menjalani proses pidana. Pada tahun 2024, **terdapat 59 perempuan** yang tercatat sebagai pelaku dalam berbagai kasus, dengan kasus narkotika sebagai bentuk keterlibatan tertinggi.

Jumlah total kasus yang diproses secara pidana dan **didampingi Litmas mengalami peningkatan**, dari **715 kasus** pada tahun sebelumnya menjadi **868 kasus** pada tahun ini, atau **naik sebesar 21,39%**.



Peningkatan ini **mengindikasikan** bahwa **akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan Litmas semakin luas**, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang berhadapan dengan proses hukum. Hal ini juga **mencerminkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang**.

Kementerian Sosial juga memberikan perhatian terkait kasus ABH. Untuk mendukung perlindungan anak di daerah, Kementerian Sosial menugaskan **Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)** sebagai **tenaga profesional**. Sakti peksos bertugas mendampingi anak-anak yang menjadi korban kasus seperti persetubuhan, pencabulan, kekerasan dan penganiayaan.

Berdasarkan data Sakti Peksos, tercatat data anak sebagai korban pada tahun 2024. Data ini disajikan berdasarkan tingkat pendidikan korban

Tabel 32. Data korban Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Padang

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan						
		Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Putus Sekolah	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0	1	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	1	2	3	1	0

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan						
		Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Putus Sekolah	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Lubuk Begalung	0	0	1	2	1	1	0
4	Padang Selatan	0	0	0	0	0	0	0
5	Padang Timur	0	0	0	2	0	0	0
6	Padang Barat	1	0	0	2	0	1	0
7	Padang Utara	0	0	0	1	0	0	0
8	Nanggalo	0	0	0	0	1	0	0
9	Kuranji	0	0	0	1	6	0	0
10	Pauh	0	0	1	0	1	0	0
11	Koto Tengah	1	0	8	2	4	2	0
Jumlah		2	0	11	12	16	6	0

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

LEMBAGA MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI DALAM MENDUKUNG PUSPAGA BASAMO

Kegagalan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak, ditambah lemahnya program pemerintah dalam mendukung dan memberdayakan keluarga, dapat menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara dalam membantu keluarga. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pembentukan **Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**, sebagai wadah yang mengintegrasikan peran keluarga dan dukungan negara dalam mengasuh serta melindungi anak.

Tabel 33. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Mendukung Puspaga Basamo tahun 2024

No	Lembaga	No	Lembaga
(1)	(2)	(1)	(2)
1	Padang Sehat Padang	10	PIK-R Kecamatan Padang Selatan
2	PKK Pokja I Kelurahan Banda Buek	11	PIK-R Kecamatan Bungus
3	Orangtua Pendi Kelurahan Banda Buek	12	SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi
4	Nurani Perempuan Kota Padang	13	SMP Negeri 22 Padang
5	P2TP2A Kota Padang	14	SMP Islam Jhons Febby Padang
6	Forum Anak Kota Padang	15	SMP Negeri 42 Padang
7	PUSPAGA Depok	16	SMP Negeri 29 Padang
8	PIK-R Kecamatan Padang Utara	17	SMP Negeri 30 Padang
9	PIK-R Kecamatan Padang Utara	18	SMP Negeri 43 Padang

Sumber : PUSPAGA BASAMO Kota Padang, 2024

Terdapat **18 lembaga masyarakat** yang berpartisipasi guna mendukung kegiatan puspaga basamo Kota Padang tahun 2024.

Tabel 34. Jenis dan Capaian layanan PUSPAGA BASAMO Kota Padang Tahun 2024

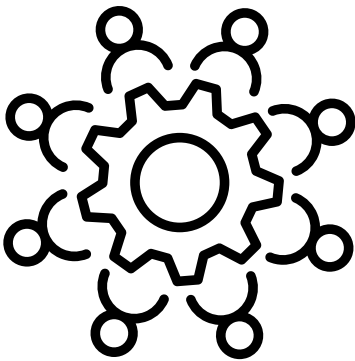
No	Program Puspaga	Keluarga Yang Sudah Terlayani		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Layanan Konseling dan Konsultasi	55	93	148
2	Layanan Informasi	14	80	94
3	Layanan Rujukan	0	0	0
4	Layanan Penjangkauan	86	42	128
5	Program Promosi dan Sosialisasi	447	481	928
Jumlah		602	696	1298

Sumber :PUSPAGA BASAMO Kota Padang, 2024

PUSPAGA Kota Padang memiliki 4 layanan di Tahun 2024, dan telah melayani 1298 orang, baik laki-laki maupun perempuan.

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Permasalahan sosial memerlukan perhatian khusus serta sinergi pada saat adanya peningkatan permasalahan, baik secara kuantitas maupun kualitas.



Data tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS (sebelumnya disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS) semakin meningkat, yaitu populasi gelandangan, pengemis, mantan penderita psikotik, dan lansia yang terlantar dari luar Kota Padang. Penanganan PMKS merupakan salah satu amanah UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menangani hal tersebut, dibutuhkan partisipasi banyak pihak, baik tenaga profesional maupun masyarakat sebagai pilar sosial. Perempuan juga mengambil peran dalam membantu masalah sosial yang dihadapi di masyarakat.

Kota Padang memiliki empat pilar untuk membantu dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, yaitu pekerja sosial, tarang karuna, tenaga kerja sosial, dan organisasi sosial. Tenaga kerja sosial dibedakan menjadi dua, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pekerja sosial masyarakat (PSM)

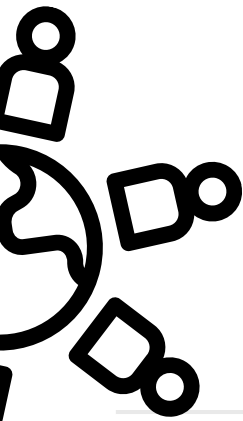
TKSK merupakan relawan sosial yang direkrut, dilatih, dan diberdayakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan seperti kemiskinan, disabilitas, anak terlantar, lansia, korban bencana, dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sementara itu, **PSM** adalah relawan sosial dari masyarakat yang secara sukarela dan aktif berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan tempat tinggalnya dan bukan pegawai pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa **perempuan mengambil peran dalam menjaga kondisi sosial sebagai pekerja sosial masyarakat (PSM)**, dengan persentase 88,46% dari seluruh anggota PSM. Jumlah **PSM kota Padang** tidak mengalami **penambahan dari tahun sebelumnya**. Selain itu, perempuan juga terlibat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dimana 9 dari 11 anggotanya adalah perempuan

Tabel 35. Jumlah Pilar Sosial di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Pekerja Sosial	Karang Taruna	Tenaga Kerja Sosial				Organisasi Sosial (Panti Sosial)
				TKSK		PSM		
				L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	6	0	1	2	16	0
2	Lubuk Kilangan	1	7	0	1	0	21	1
3	Lubuk Begalung	0	15	0	1	3	42	2
4	Padang Selatan	0	12	0	1	6	30	3
5	Padang Timur	1	10	1	0	1	29	3
6	Padang Barat	0	10	0	1	10	20	1
7	Padang Utara	0	7	0	1	5	16	2
8	Nanggalo	1	6	0	1	1	17	8
9	Kuranji	2	9	1	0	1	26	4
10	Pauh	1	9	0	1	5	22	2
11	Koto Tangah	4	13	0	1	2	37	9
Kota Padang		10	104	2	9	36	276	35

Sumber : Dinas Sosial, 2024



Koto Tangah memiliki jumlah pekerja sosial terbanyak, yaitu

61 pekerja

Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah pekerja sosial **paling sedikit**, yaitu

25 pekerja

KASUS KEKERASAN

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat mengancam yang menimbulkan kerugian fisik, mental, psikologi, seksual, maupun sosial seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, terutama pada kelompok perempuan

Tabel 36. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Umur di Kota Padang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Kelompok Umur			Total
		0 < 18	18 > 25	> 25	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	0	1	1	2
4	Padang Selatan	0	1	0	1
5	Padang Timur	0	0	2	2
6	Padang Barat	0	0	2	2
7	Padang Utara	0	2	3	5
8	Nanggalo	0	0	1	1
9	Kuranji	0	1	3	4
10	Pauh	0	0	1	1
11	Koto Tangah	0	3	9	12
Total		0	8	22	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan **terbanyak** berada pada **kelompok usia di atas 25 tahun**, yakni **sebanyak 9 orang**, dan seluruh kasus tersebut terjadi di **Kecamatan Koto Tangah**. Secara umum, jumlah kekerasan terhadap perempuan **mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya**. Pada tahun 2023 tercatat 27 kasus, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 30 kasus. Di Kecamatan Koto Tangah, peningkatan signifikan terjadi pada kelompok usia perempuan di atas 25 tahun, **dari 3 kasus pada tahun 2023 menjadi 9 kasus yang dilaporkan pada tahun 2024**

Tabel 37. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Tidak / Belum Sekolah	Belum Tamat Sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	0	0	0	0	2	0	2
4	Padang Selatan	0	0	0	0	1	0	1
5	Padang Timur	0	1	0	0	0	1	2
6	Padang Barat	0	0	0	0	2	0	2
7	Padang Utara	0	0	0	0	4	1	5
8	Nanggalo	0	0	0	0	0	1	1
9	Kuranji	0	0	0	0	1	3	4
10	Pauh	0	0	0	0	1	0	1
11	Koto Tangah	1	0	0	1	7	3	12
total		1	1	0	1	18	9	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Tabel 38. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Pekerjaan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Swasta/ Wiraswasta	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	Pekerjaan keluarga	Pelajar/ lain lain	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	0	1	1	0	2
4	Padang Selatan	0	0	1	0	1
5	Padang Timur	0	1	1	0	2
6	Padang Barat	0	0	2	0	2
7	Padang Utara	2	0	1	2	5
8	Nanggalo	0	1	0	0	1
9	Kuranji	0	2	1	1	4
10	Pauh	0	0	1	0	1
11	Koto Tengah	0	6	4	2	12
Total		2	11	12	5	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Di Kota Padang, tempat kerja perempuan terbagi ke dalam empat kategori: sektor swasta/wirausaha, buruh/karyawan/pegawai, pekerjaan keluarga, serta pelajar dan kategori lainnya. Berdasarkan data yang tercatat di P2TP2A Kota Padang Tahun 2024 mengungkapkan bahwa **kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di seluruh sektor pekerjaan tersebut**. Fakta ini mencerminkan bahwa lingkungan kerja bagi perempuan belum sepenuhnya aman dari tindak kekerasan.

Kasus kekerasan **tertinggi** terjadi pada kategori **pekerjaan keluarga, dengan 12 laporan kasus**. Kendati demikian, selama tahun 2024, belum **ada aduan yang dari dua kecamatan yang yaitu Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Kilangan**, sehingga terdata bahwa tidak ada laporan kekerasan terhadap perempuan yang bekerja di wilayah tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan tak hanya di tempat kerja, namun juga dalam **kehidupan Pernikahan**.

Tabel 39. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Belum Kawin	Kawin	Cerai Mati	Cerai Hidup	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	1	1	0	0	2
4	Padang Selatan	0	1	0	0	1
5	Padang Timur	0	2	0	0	2
6	Padang Barat	0	2	0	0	2
7	Padang Utara	2	3	0	0	5
8	Nanggalo	0	1	0	0	1
9	Kuranji	1	3	0	0	4
10	Pauh	0	1	0	0	1
11	Koto Tangah	2	10	0	0	12
Total		6	24	0	0	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Data tahun 2024 menunjukkan sebanyak **80% kekerasan dialami oleh perempuan dalam status pernikahan**, dan sisanya 20% dialami sebelum pernikahan. Fakta ini menunjukkan kehidupan pernikahan belum mampu menjadi tempat yang aman bagi perempuan untuk terhindar dari kekerasan. Bahkan, jumlah kekerasan dalam pernikahan **meningkat dibandingkan tahun sebelumnya**, yang berjumlah 22 kasus.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus pihak terkait, khususnya lembaga perlindungan perempuan, agar dapat dicegah dan ditangani secara efektif sehingga menekan angka kekerasan rumah tangga di masa depan.



Di antara berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan di Kota Padang pada tahun 2024, **kekerasan psikis menempati posisi tertinggi**. Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan psikis bekerja secara diam-diam namun berdampak dalam. Jenis kekerasan ini menyerang aspek emosional dan mental korban, merusak perasaan, martabat, harga diri, serta kesehatan jiwa.

Bentuk-bentuk kekerasan psikis yang sering ditemukan antara lain berupa ucapan yang merendahkan, ancaman verbal, pengucilan sosial, kontrol berlebihan atas kehidupan pribadi, hingga manipulasi emosional (gaslighting). Dampaknya tidak kalah serius dari kekerasan fisik: korban dapat mengalami stres berkepanjangan, depresi, trauma, hingga kehilangan rasa percaya diri.

Data menunjukkan bahwa perempuan di Kota Padang menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan ini. Fakta ini mencerminkan bahwa banyak perempuan masih menerima perlakuan buruk, bahkan dalam ruang yang seharusnya aman seperti rumah tangga.

Tabel 40. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	KDRT	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	0	1	1	0	0	0	2
4	Padang Selatan	0	1	0	0	0	0	1
5	Padang Timur	0	0	0	0	0	2	2
6	Padang Barat	0	0	0	0	0	2	2
7	Padang Utara	0	3	2	0	0	0	5
8	Nanggalo	0	1	0	0	0	0	1
9	Kuranji	0	1	0	0	0	3	4
10	Pauh	0	1	0	0	0	0	1
11	Koto Tangah	0	9	0	0	0	3	12
Jumlah		0	17	3	0	0	10	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Selanjutnya akan dibahas terkait kekerasan yang dialami perempuan **berdasarkan tempat terjadinya**. P2TP2A Kota Padang membagi tempat kekerasan kedalam 4 bagian, yaitu rumah, tempat kerja dan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga tercatat sebagai bentuk kejahatan yang dominan dialami perempuan, dengan 10 kasus dilaporkan sepanjang tahun 2024. Sementara, rumah tangga menjadi tempat paling sering terjadinya kekerasan pada perempuan. Tercatat 80% kekerasan dialami perempuan di rumah tangga, dan sisanya di tempat lain.

Tabel 41. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat terjadi di Kota Padang Tahun 2024

NO	Kecamatan	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	1	0	1	2
4	Padang Selatan	1	0	0	1
5	Padang Timur	2	0	0	2
6	Padang Barat	2	0	0	2
7	Padang Utara	5	0	0	5
8	Nanggalo	1	0	0	1
9	Kuranji	3	0	1	4
10	Pauh	1	0	0	1
11	Koto Tangah	8	0	4	12
Jumlah		24	0	6	30

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Secara umum, kekerasan lebih banyak dialami oleh perempuan berusia di atas 25 tahun, tamatan SLTA, yang bekerja bersama keluarga, sudah menikah, dengan jenis kekerasan psikis, dan dialami di dalam rumah (rumah tangga). Ini menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk memberikan perlindungan yang nyata terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, dimanapun tempatnya, baik dari keluarga terdekat atau orang sekitar.



Dari 30 jumlah kekerasan yang dialami perempuan, P2TP2A telah memberikan pelayanan untuk membantu korban kekerasan tersebut. **Tercatat 30 pengaduan** pada tahun 2024 yang diterima P2TP2A, dan penegakan dan bantuan hukum **sebanyak 5 pelayanan**, dimana para korban didampingi dalam mendapatkan bantuan hukum, mulai dari membuat laporan hingga proses persidangan.

Tabel 42. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis pelayanan yang diterima dari P2TP2A di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakkan & Bantuan Hukum	Pemulangan & Reintegrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0	0	0
3	Lubuk Begalung	2	0	0	1	0
4	Padang Selatan	1	0	0	0	0
5	Padang Timur	2	0	0	1	0
6	Padang Barat	2	0	0	0	0
7	Padang Utara	5	0	0	1	0
8	Nanggalo	1	0	0	0	0
9	Kuranji	4	0	0	0	0
10	Pauh	1	0	0	0	0
11	Koto Tangah	12	0	0	2	0
Jumlah		30	0	0	5	0

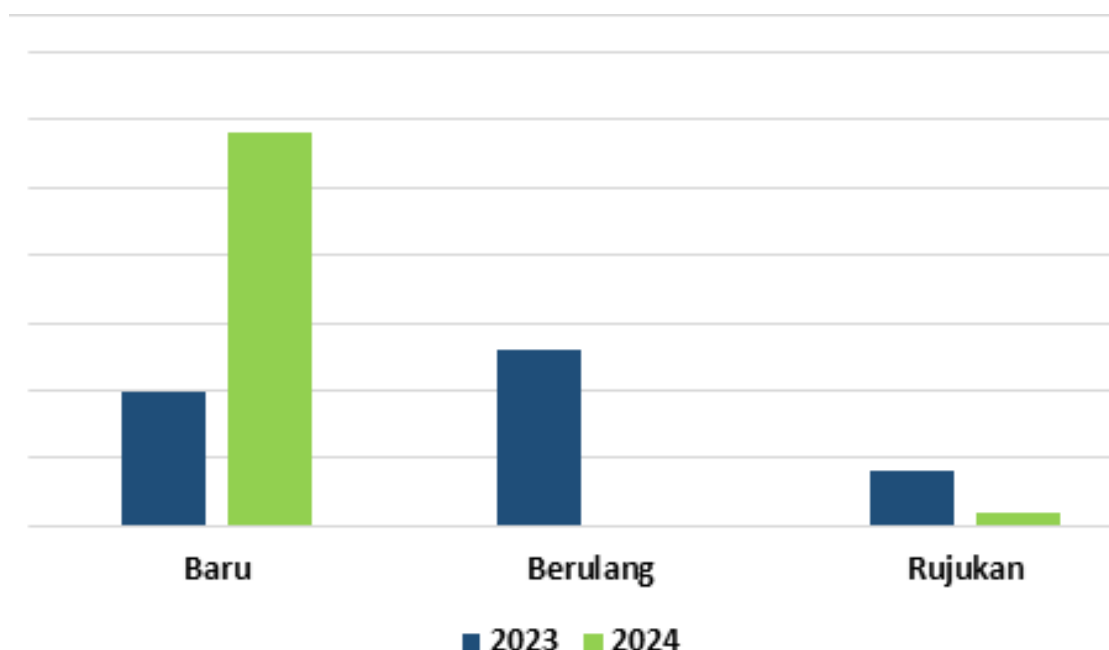
Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Tabel 43. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut frekuensi kekerasan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	0
3	Lubuk Begalung	2	0	0
4	Padang Selatan	1	0	0
5	Padang Timur	2	0	0
6	Padang Barat	2	0	0
7	Padang Utara	5	0	0
8	Nanggalo	1	0	0
9	Kuranji	4	0	0
10	Pauh	1	0	0
11	Koto Tangah	11	0	1
Total		29	0	1

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Frekuensi **kekerasan baru** pada perempuan **meningkat dari tahun sebelumnya**, namun Kota Padang telah **mampu menekan jumlah rujukan**. Menurut catatan P2TP2A, di tahun 2024 **tidak ada lagi kekerasan yang berulang**, yang pada tahun sebelumnya ada sebanyak 13 kasus kekerasan.



Gambar 24. Jumlah kekerasan pada perempuan berdasarkan frekuensinya pada tahun 2023 dan 2024 di Kota Padang.

Selain perempuan, **kelompok yang rentan terhadap kekerasan adalah kelompok anak**. Adapun data kekerasan terhadap anak yang tercatat pada P2TP2A Kota Padang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kekerasan di Kota Padang 2024.

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan						Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	0	1	0	1	0	2
3	Lubuk Begalung	5	1	4	0	0	0	10
4	Padang Selatan	0	1	2	0	0	0	3

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan						Total
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplo itasi	Penelan taran	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Padang Timur	3	4	2	0	3	0	12
6	Padang Barat	1	5	4	0	0	0	10
7	Padang Utara	1	4	3	0	0	0	8
8	Nanggalo	0	0	2	0	0	0	2
9	Kuranji	3	3	1	0	0	0	7
10	Pauh	0	0	2	0	0	0	2
11	Koto Tengah	0	10	10	0	1	0	21
Total		13	28	31	0	5	0	77

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Tahun 2024, tercatat **sebanyak 77 kasus** kekerasan yang terjadi pada anak, dimana sebanyak **40,25% dari kekerasan tersebut berbentuk kekerasan seksual**. Jenis kejahatan ini adalah yang paling banyak terjadi. Namun, **jumlah korban kekerasan telah berkurang dari tahun sebelumnya**, yang mencapai 45% dari total kekerasan di Kota Padang di tahun 2023.

Koto Tengah menjadi kecamatan dengan tingkat kekerasn pada ada yang tertinggi di Kota Padang dan tercatat pada P2TP2A Kota Padang.

Tabel 45. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis layanan di P2TP2A Kota Padang 2024

No	Kecamatan	Jenis Layanan				
		Layanan Pengaduan	Layanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan dan Reintegrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	2	0	0	1	0
3	Lubuk Begalung	10	0	0	3	0
4	Padang Selatan	3	0	0	1	0
5	Padang Timur	12	0	1	1	0
6	Padang Barat	10	0	1	1	0
7	Padang Utara	8	0	0	1	0
8	Nanggalo	2	0	0	0	0
9	Kuranji	7	0	0	0	0
10	Pauh	2	0	0	2	0
11	Koto Tengah	21	0	2	7	1
Total		77	0	4	17	1

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Berdasarkan data **dari P2TP2A Kota Padang**, Kecamatan **Koto Tengah** tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemanfaatan layanan tertinggi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. **Dari 21 korban yang terdata di kecamatan ini**, sebanyak 21 layanan pengaduan telah dimanfaatkan. Selain itu, terdapat pula 2 layanan rehabilitasi sosial, 7 layanan penegakan dan bantuan hukum, serta 1 layanan pemulangan dan reintegrasi.

Tabel 46. Jumlah Kekerasan Pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur di Kota Padang 2024

NO	Kecamatan	Jenis Kelamin		Umur			Total
		Perempuan	Laki laki	0 - 10	11 - 15	16 - 18	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bungus Teluk Kabung	0	0	0	0	0	0
2	Lubuk Kilangan	1	1	0	2	0	2
3	Lubuk Begalung	5	5	4	3	3	10
4	Padang Selatan	2	1	0	2	1	3
5	Padang Timur	6	6	6	6	0	12
6	Padang Barat	4	6	1	7	2	10
7	Padang Utara	7	1	2	5	1	8
8	Nanggalo	2	0	0	1	1	2
9	Kuranji	4	3	1	4	2	7
10	Pauh	1	1	1	1	0	2
11	Koto Tengah	20	1	6	14	1	21
Total		52	25	21	45	11	77

Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2024

Berdasarkan data P2TP2A, Anak perempuan mengalami kekerasan lebih banyak di bandingkan anak laki-laki di tahun 2024. sekitar dua dari tiga korban kekerasan anak adalah perempuan. **Jumlah korban kekerasan meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 74 orang.**

Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah kota Padang dan dinas terkait. kenaikan jumlah korban kekerasan anak juga mengindikasikan bahwa semakin banyak pihak yang terbuka dan melaporkan terkait kekerasan tersebut.



Tabel 47. Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Hubungan dengan korban Anak di Kota Padang Tahun 2024

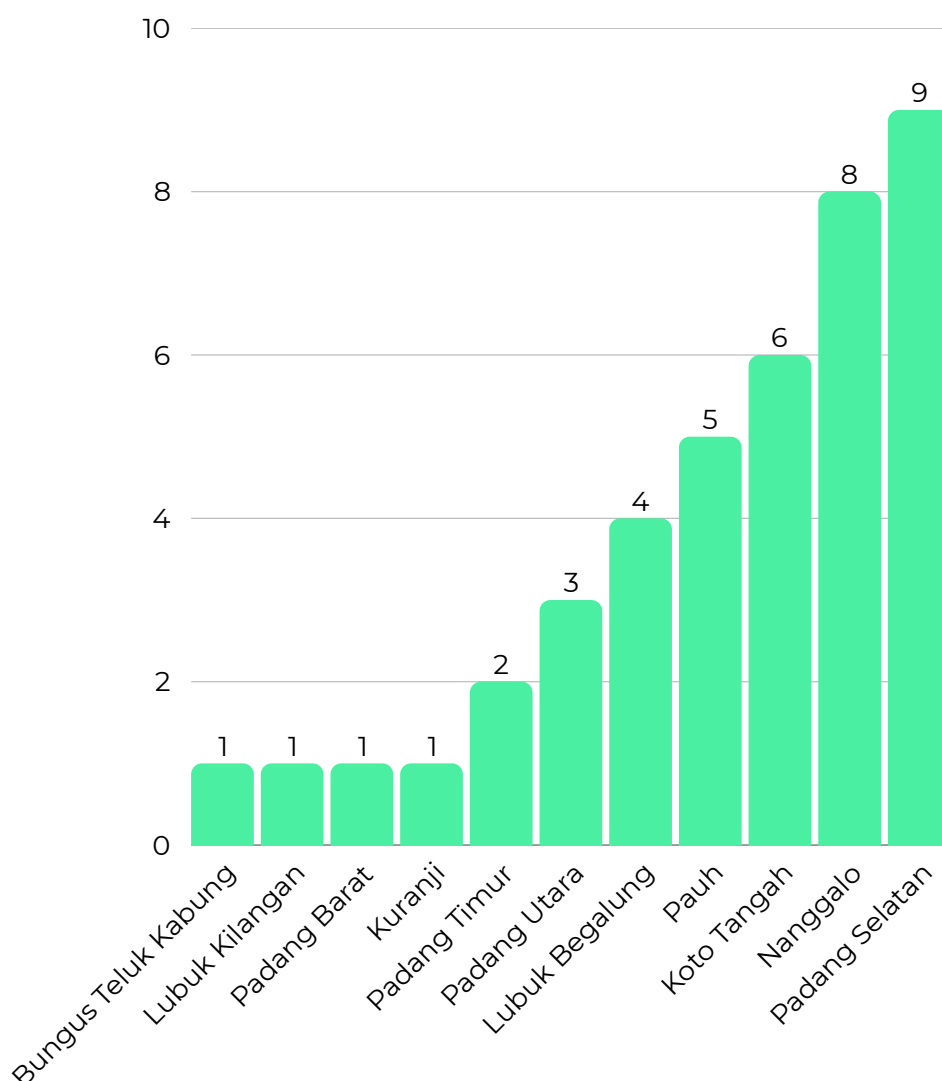
No	Kecamatan	Hubungan dengan Korban			
		Orang Tua	Keluarga	Keluarga Lainnya	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bungus Teluk Kabung	0	1	0	0
2	Lubuk Kilangan	0	1	0	6
3	Lubuk Begalung	0	1	1	3
4	Padang Selatan	0	0	0	0
5	Padang Timur	0	0	1	1
6	Padang Barat	1	0	1	2
7	Padang Utara	0	0	0	1
8	Nanggalo	0	0	0	1
9	Kuranji	0	0	0	7
10	Pauh	1	0	0	1
11	Koto Tangah	2	0	5	10
Jumlah		4	3	8	32

Sumber : Sakti Peksos, 2024

Pada tahun 2024, tercatat **pelaku kekerasan** pada anak terbanyak adalah **pihak lain diluar keluarga, sama seperti tahun sebelumnya**. Adapun jumlah pelaku yang bukan keluarga di Kota Padang pada **tahun 2024 adalah 32 pelaku**, meningkat dari **tahun sebelumnya, 29 pelaku**.

PENYALAHGUNAAN NAPZA

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan zat terlarang yang mempengaruhi sistem saraf, suasana hati, kesadaran bahkan perilaku seseorang. Penggunaan NAPZA dapat berdampak pada kecanduan dan ketergantungan.



Gambar 25. Jumlah Penggunaan NAPZA di Kota Padang Tahun 2024

Berdasarkan data dari BNN Kota Padang, pada tahun 2024 tercatat sebanyak **41 jumlah** pengguna NAPZA di Kota Padang yang tersebar di 11 Kecamatan. **Kecamatan Padang Selatan** menjadi kecamatan dengan jumlah pengguna NAPZA **tertinggi**.

Pada tahun 2023, **tercatat sebanyak 83 Kasus NAPZA di Kota Padang**. Hal ini menunjukkan **terjadinya penurunan signifikan jumlah pengguna NAPZA di Kota Padang pada tahun 2024**. Di Kecamatan Padang Barat, Jumlah pengguna NAPZA turun drastis, dari 10 pengguna di tahun 2023, menjadi 1 pengguna di tahun 2024. Meski jumlah penyalahgunaan NAPZA sudah berkurang drastis, namun tetap perlu menjadi perhatian serius dari OPD dan lembaga terkait di Kota Padang.

BAB IX

BENCANA ALAM

2025

PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG



Bencana alam merupakan suatu fenomena alam yang dapat mengancam keselamatan manusia, kerusakan dan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Bencana alam bisa terjadi di wilayah manapun, termasuk di Kota Padang. Pada tahun 2024, bencana alam yang terjadi di Kota Padang adalah pohon tumbang, orang hanyut/tenggelam, banjir, longor, Angin badai/puting beliung, abrasi pantai, gempa bumi, kebakaran hutan, kekeringan.

Tabel 48. Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Padang Tahun 2024

No	Jenis Kejadian	Bulan												Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pohon Tumbang	22	45	23	17	23	38	17	26	75	19	10	34	349
2	Orang Tenggelam/ Hanyut	2	4	1	3	1	0	0	3	2	1	2	0	19
3	Banjir	0	0	27	0	0	1	0	0	0	0	1	0	29
4	Longsor	1	0	3	2	4	1	0	1	2	8	0	0	22
5	Angin Badai/Puting Beliung	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	6
6	Abrasi Pantai	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5
7	Gempa Bumi yang dirasakan	9	15	20	24	25	35	30	25	14	22	14	21	254
8	Kebakaran Hutan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	15	11	0	0	0	0	26
Jumlah		36	64	74	46	53	75	63	66	96	52	27	59	711

Sumber: BPBD Kota Padang, 2024

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2024, bencana alam di Kota Padang paling banyak terjadi di bulan September. Sepanjang tahun Kebakaran hutan hanya terjadi satu kali, yaitu pada bulan Juli. Pohon tumbang dan gempa yang terasa menjadi dua bencana yang banyak terjadi tahun 2024 di Kota Padang.

BAB X

PENUTUP

2025

PROFIL GENDER DAN ANAK KOTA PADANG

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data perspektif gender Kota Padang dapat dilihat masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa isu penting dan untuk lebih diperhatikan adalah:

Ketersediaan Data

1. Menjadikan Data Terpilah sebagai isu strategis untuk diprogramkan dan dilaksanakan pada masing masing SKPD baik di tingkat Kota maupun di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Ketersediaan Data Terpilah sangat penting dalam menyelesaikan ketimpangan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan, yang idealnya akan memiliki pendekatan spesifik sesuai kebutuhan.

Beberapa isu menarik pada Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.

1. Meningkatkan jumlah laporan kekerasan pada perempuan. Perempuan mengalami kekerasan baik di rumah maupun di tempat bekerja. Kekerasan psikis menjadi jenis kekerasan yang sering dialami.
2. Anak yang menjadi korban kekerasan dengan pelaku terbanyak adalah pihak luar keluarga. Selain itu, terdapat anak yang juga tertular HIV
3. Rata-Rata lama sekolah penduduk Kota Padang yang kurang dari 12 tahun, hal ini akan menimbulkan dampak kurangnya penduduk yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini akan berdampak pada banyak sektor, tak hanya pendidikan namun juga pada sektor sosial ekonomi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilihat dari Buku Data Perspektif Gender Kota Padang, maka beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga lembaga yang terlibat dalam program pengarusutamaan Gender untuk dapat membuka dan membagi informasi dengan mudah dan efektif.
2. Perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peranan dan keterlibatan lembaga lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender di Kota Padang. Program penyusunan Data Perspektif Gender Kota Padang diperlukan setiap tahun untuk mendorong ketersediaan data gender yang berkuantitas dan berkualitas di semua bidang instansi terkait.
3. Dukungan dari Pemerintah Kota Padang dan dinas terkait sangat diperlukan untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap penduduk, terutama perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan. Pendampingan dan penyuluhan perlu diberikan agar masyarakat memahami berbagai jenis kekerasan, mengetahui langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri, serta mengenal cara memperoleh perlindungan dari pemerintah atau lembaga yang berwenang.
4. Dukungan dari pemerintah dan pihak terkait agar anak dapat menempuh pendidikan layak dan meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kota Padang
5. Dukungan pemerintah di sektor kesehatan, khususnya terkait kebutuhan ibu hamil dan ketersediaan posyandu.

Dengan disusunnya buku ini secara berkesinambungan juga akan membantu ketersediaan data gender yang lengkap, akurat, mutakhir berkelanjutan dan relevan. Dengan demikian ini akan menjadi bahan rujukan dalam perumusan kebijakan mulai perencanaan, sampai pemantauan dan evaluasi program program pembangunan



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PADANG

**PROFIL GENDER DAN ANAK
KOTA PADANG
2025**
